

**ALASAN DI BALIK PEMULIHAN HUBUNGAN IRAN DAN ARAB
SAUDI DALAM TINJAUAN *FOREIGN POLICY*
*DECISION MAKING PROCESS***

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

Janitra Ega Prasetyo

21323073

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

**ALASAN DI BALIK PEMULIHAN HUBUNGAN IRAN DAN ARAB
SAUDI DALAM TINJAUAN *FOREIGN POLICY*
*DECISION MAKING PROCESS***

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

Janitra Ega Prasetyo

21323073

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2026

LEMBAR PENGESAHAN

ALASAN BALIK PEMULIHAN HUBUNGAN IRAN DAN ARAB SAUDI
DALAM TINJAUAN *FOREIGN POLICY*
DECISION MAKING PROCESS

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

22 Januari 2026



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Ketua Program Studi

Karina
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

1. Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.

2. Mohammad Rezky Utama, S.IP., M.Si.

3. Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D.

Tanda Tangan

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Pernyataan Integritas Akademik

Dengan ini saya menyatakan bahwa proposal skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Jogjakarta, 22 Januari 2026



Janitra Ega Prasetyo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
ABSTRAK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Cakupan penelitian	6
1.5 Tinjauan Pustaka	6
1.6 Kerangka Pemikiran.....	8
1.7 Argumen Sementara.....	10
1.8 Metode Penelitian.....	11
1.8.1 Jenis Penelitian	11
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	11
1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....	11
1.8.4 Proses Penelitian	11
1.9 Sistematika Pembahasan	12
BAB II Sejarah Iran dengan Arab Saudi.....	13
2.1 Konteks Historis Hubungan Iran dan Arab Saudi	13
2.2 Penyebab Konflik Iran dan Arab Saudi.....	17
BAB III Analisis Iran Menjalin Kembali Hubungan dengan Arab Saudi	24
3.1 Faktor Domestik	25
3.2 Kekuatan Ekonomi	26
3.3 Kekuatan Militer.....	28
3.4 Kekuatan Geografis.....	35
3.5 Kekuatan Budaya	38
3.6 Rekonsiliasi Iran-Saudi	39
BAB IV PENUTUP.....	44
4.1 Hasil Kajian	44
4.2 Konklusi	45
DAFTAR PUSTAKA.....	47

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Kekuatan Ekonomi Bruto Iran vs Arab Saudi	27
Tabel 3. 2 Kekuatan Iran vs Arab Saudi	29
Tabel 3. 3 Kekuatan Ofensif Iran dan Arab Saud	33
Tabel 3. 4 Komparasi MatraPostur Ofensif–Defensif.....	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Jalur Energi Strategis Titik Konflik Geopolitik Iran–Arab Saudi36

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kebijakan pemulihan hubungan diplomatik Arab Saudi dan Iran pada tahun 2023 dengan menggunakan pendekatan realisme beraliran defensif serta teori proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri William D. Coplin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kebijakan bilateral Arab Saudi–Iran dalam konteks historis dan regional selama lima tahun terakhir, mengilustrasikan kegunaan teori keseimbangan ancaman dalam realisme sebagai instrumen analisis kebijakan luar negeri serta menelaah pengaruh faktor domestik dan internasional terhadap keputusan pemulihan hubungan diplomatik kedua negara. Kajian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang memanfaatkan data primer dan sekunder dari jurnal akademik, buku, laporan institusi internasional, serta pernyataan resmi dan wawancara daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemulihan hubungan diplomatik Arab Saudi dan Iran merupakan hasil dari interaksi kompleks antara tekanan ekonomi domestik, pertimbangan stabilitas politik internal, dinamika kekuatan ekonomi dan militer regional, serta perubahan persepsi elite politik terhadap ancaman dan peluang strategis. Melalui kerangka Coplin, kebijakan ini dipahami sebagai respons rasional terhadap meningkatnya biaya konfrontasi dan kebutuhan menciptakan stabilitas regional yang lebih kondusif bagi kepentingan nasional masing-masing negara.

Kata Kunci: Arab Saudi, Iran, Kebijakan Luar Negeri, Realisme

This study analyzes the restoration of diplomatic relations between Saudi Arabia and Iran in 2023 using a defensive realist approach and William D. Coplin's foreign policy decision-making theory. The research aims to examine Saudi–Iranian bilateral policy dynamics within their historical and regional context over the past five years, illustrate the relevance of balance-of-threat theory within neoclassical realism as an analytical tool for foreign policy and investigate how domestic and international factors influenced the decision to restore diplomatic relations. This study employs a descriptive research design based on library research, utilizing primary and secondary data derived from academic journals, books, reports from international institutions, and official statements and online interviews. The findings indicate that the normalization of Saudi–Iranian relations was shaped by the interaction of domestic economic pressures, internal political stability concerns, regional economic and military power dynamics, and shifts in elite perceptions of strategic threats and opportunities. Through Coplin's framework, the 2023 diplomatic rapprochement is understood as a rational foreign policy decision aimed at reducing the costs of prolonged confrontation and fostering a more stable regional environment aligned with each state's national interests.

Keywords: Saudi Arabia, Iran, Foreign Policy, Realism

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan Internasional sebagai disiplin ilmu mempelajari interaksi antarnegara yang dibentuk oleh kepentingan, persepsi, dan respons terhadap lingkungan internasional (Jackson dan Sorensen 2016). Dalam praktiknya, kebijakan luar negeri suatu negara tidak lahir secara netral, melainkan dipengaruhi oleh bagaimana negara tersebut memandang ancaman terhadap keamanan dan kepentingan nasionalnya (Coplin 1992). Dinamika ini sangat terlihat di kawasan Timur Tengah, khususnya dalam hubungan antara Iran dan Arab Saudi (Gause 2014).

Hubungan diplomatik Iran dan Arab Saudi secara resmi dimulai pada tahun 1929 melalui penandatanganan Perjanjian Persahabatan Saudi–Iran (Badeeb 1993). Pada fase awal, interaksi kedua negara bersifat terbatas dan berfokus pada isu keagamaan, terutama pengelolaan pelaksanaan ibadah haji di Mekkah dan Madinah (Keynoush 2016). Intensitas hubungan bilateral mulai meningkat pada dekade 1960-an hingga 1970-an, ketika kedua negara menjalin kerja sama politik dan keamanan dalam konteks Perang Dingin dan berperan sebagai mitra strategis Amerika Serikat dalam menjaga stabilitas kawasan Teluk Persia (Gause 2009).

Situasi mulai berubah ketika Iran melakukan modernisasi kekuatan militernya pada awal 1970-an dan mengambil alih Pulau Tunb Besar, Tunb Kecil, serta Abu Musa pada tahun 1971 (Ackerman 2011). Langkah tersebut menimbulkan kekhawatiran di pihak Arab Saudi karena memperkuat posisi Iran secara militer dan geopolitik di kawasan. Saudi kemudian merespons dengan memperkuat kerja sama keamanan bersama negara-negara Teluk lainnya serta menggunakan pengaruhnya di OPEC untuk menekan posisi Iran melalui kebijakan harga minyak (BBC 1977; Gause 2009). Pada fase ini, kedua negara mulai saling memandang satu sama lain sebagai potensi ancaman terhadap keseimbangan kawasan.

Peristiwa penting yang menjadi titik balik hubungan kedua negara terjadi pada tahun 1979 dengan terjadinya Revolusi Islam Iran. Kejatuhan rezim Shah

Mohammad Reza Pahlavi dan naiknya Ayatollah Ruhollah Khomeini membawa perubahan mendasar dalam orientasi kebijakan luar negeri Iran (Keynoush 2016). Iran mengadopsi ideologi Islam revolusioner yang menolak dominasi Barat dan secara terbuka mengkritik negara-negara yang dianggap dekat dengan Amerika Serikat, termasuk Arab Saudi (Nasr 2006).

Ketegangan semakin meningkat pada dekade 1980-an, khususnya setelah pecahnya Perang Iran–Irak pada tahun 1980. Iran memandang Arab Saudi sebagai bagian dari blok yang mendukung Irak, baik secara politik maupun finansial (Keynoush 2016). Pada tahun 1987 terjadi bentrokan jemaah Syiah asal Iran sempat terjadi konflik dengan petugas Arab Saudi di Makkah, jemaah haji asal Iran melakukan aksi pawai yang disertai semboyan khas Iran, hingga ada massa aksi beberapa oknum dengan identitas yang tidak diketahui melempari massa dengan batu bata sehingga mengakibatkan kerusakan pecah dan menjadi kerusuhan. Dampak dari kerusuhan ini terdapat 402 korban tewas. Terdiri 275 warga Iran, 85 warga Arab Saudi termasuk aparat keamanan, dan 42 jemaah haji dari sejumlah negara lain (Wikipedia 2025). Persepsi ancaman ini memperkuat sikap konfrontatif Iran terhadap Saudi. Puncak eskalasi terjadi pada tahun 1987 ketika insiden haji di Makkah menyebabkan ratusan jemaah Iran meninggal dunia, yang kemudian memicu krisis diplomatik serius dan pemutusan hubungan diplomatik antara kedua negara (Matthiesen 2013).

Pasca-1987, hubungan Iran dan Arab Saudi mengalami pasang surut. Hubungan diplomatik sempat dipulihkan pada awal 1990-an, namun kembali memburuk akibat persaingan pengaruh di kawasan Timur Tengah (Gause 2014). Rivalitas ini tercermin dalam berbagai konflik proksi, seperti di Yaman, Suriah, dan Lebanon, di mana Iran dan Arab Saudi mendukung aktor-aktor yang berseberangan (Terrill 2011). Ketegangan mencapai titik terendah kembali pada tahun 2016 setelah Arab Saudi mengeksekusi ulama Syiah Nimr al-Nimr, yang memicu serangan terhadap Kedutaan Besar Saudi di Teheran dan berujung pada pemutusan hubungan diplomatik untuk kedua kalinya (Berg 2023).

Dalam konteks hubungan yang sarat konflik tersebut, keputusan Iran dan Arab Saudi untuk memulihkan hubungan diplomatik pada 10 Maret 2023 menjadi peristiwa yang signifikan. Kedua negara sepakat untuk membuka kembali kedutaan besar dan memulai kembali komunikasi diplomatik setelah lebih dari tujuh tahun hubungan terputus (The Iran Primer 2023). Normalisasi ini menunjukkan adanya perubahan persepsi dan perhitungan strategis di kedua pihak, khususnya terkait ancaman dan kepentingan nasional masing-masing negara (Benmansour 2023).

Pemulihan hubungan diplomatik Iran dan Arab Saudi pada tahun 2023 juga tidak dapat dilepaskan dari perubahan lingkungan strategis regional dan internasional yang semakin kompleks. Dalam beberapa tahun terakhir, Timur Tengah mengalami peningkatan ketidakpastian keamanan yang ditandai oleh eskalasi konflik proksi, volatilitas harga energi global, serta berkurangnya kepastian komitmen keamanan dari aktor eksternal, khususnya Amerika Serikat. Penarikan bertahap perhatian strategis AS dari Timur Tengah ke kawasan Indo-Pasifik mendorong negara-negara regional untuk meninjau ulang orientasi kebijakan luar negeri mereka dan mengurangi ketergantungan pada kekuatan eksternal (Gause 2020).

Bagi Iran, situasi ini memperbesar tekanan strategis karena negara tersebut menghadapi kombinasi ancaman eksternal berupa sanksi ekonomi berkepanjangan, isolasi diplomatik, serta risiko konflik militer tidak langsung dengan negara-negara Teluk. Pada saat yang sama, Arab Saudi juga menghadapi tantangan domestik dan regional, termasuk ancaman serangan dari aktor non-negara di Yaman, kebutuhan stabilitas untuk mendukung agenda transformasi ekonomi Vision 2030, serta risiko eskalasi konflik yang dapat merusak kepentingan jangka panjangnya (Ehteshami dan Hinnebusch 2023). Kedua negara mulai memandang konfrontasi berkelanjutan sebagai beban strategis yang justru memperbesar ancaman terhadap kepentingan nasional masing-masing. Iran, khususnya, menghadapi dilema kebijakan luar negeri di mana kelanjutan rivalitas dengan Arab Saudi berpotensi memperparah tekanan ekonomi domestik dan membatasi ruang manuver diplomatiknya di kawasan.

Pemulihan hubungan diplomatik dipahami sebagai langkah rasional dalam proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Iran untuk menurunkan tingkat ancaman eksternal, membuka peluang diplomasi regional, serta menciptakan lingkungan strategis yang lebih kondusif bagi stabilitas domestik. Keputusan ini mencerminkan perubahan persepsi elite politik Iran terhadap Arab Saudi, dari aktor yang semata-mata dipandang sebagai rival ideologis menjadi aktor regional yang dapat diajak berkompromi demi mereduksi risiko konflik dan ketidakpastian keamanan di kawasan Teluk Persia (Benmansour 2023; Gause 2014).

Pihak yang merasa paling terancam dalam hubungan Iran–Arab Saudi cenderung adalah Arab Saudi, karena persepsi tersebut dibentuk oleh cara elite pengambil kebijakan menilai dinamika keamanan regional dan potensi ancaman terhadap stabilitas domestik maupun kawasan. Elite Saudi memandang Iran sebagai aktor ekspansionis yang berupaya memperluas pengaruhnya melalui jaringan aktor non-negara dan keterlibatan langsung di sejumlah konflik regional, seperti di Yaman, Irak, Suriah, dan Lebanon. Persepsi ancaman ini mendorong Arab Saudi untuk merumuskan kebijakan luar negeri yang bersifat defensif, termasuk memperkuat aliansi strategis, meningkatkan kapasitas keamanan, dan menahan laju pengaruh Iran di Timur Tengah. Sementara itu, Iran dalam proses pengambilan kebijakan luar negerinya lebih membangun narasi sebagai pihak yang berada di bawah tekanan dan pembatasan, khususnya akibat sanksi internasional dan kebijakan penyeimbangan kekuatan yang melibatkan Arab Saudi dan mitra-mitranya. Arab Saudi lebih dominan memandang hubungan bilateral tersebut melalui lensa ancaman keamanan, sedangkan Iran cenderung menekankan pengalaman tekanan dan marginalisasi dalam membentuk orientasi kebijakan luar negerinya.

Untuk memahami keputusan Iran menjalin kembali hubungan dengan Arab Saudi, penelitian ini menggunakan teori proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri yang dikemukakan oleh William D. Coplin. Coplin memandang kebijakan luar negeri sebagai hasil interaksi antara faktor domestik, faktor internasional, dan persepsi para pengambil keputusan terhadap ancaman dan

peluang yang dihadapi negara (Coplin 1992). Dalam kerangka ini, kebijakan luar negeri tidak semata-mata ditentukan oleh struktur sistem internasional, tetapi juga oleh bagaimana elite politik menafsirkan situasi dan merespons tekanan yang ada.

Pendekatan Coplin relevan untuk menganalisis pemulihan hubungan Iran–Arab Saudi karena keputusan tersebut mencerminkan perubahan kalkulasi ancaman, baik yang bersumber dari lingkungan regional maupun dari kondisi domestik Iran sendiri. Tekanan ekonomi akibat sanksi internasional, dinamika konflik regional, serta kebutuhan akan stabilitas keamanan menjadi faktor penting yang memengaruhi proses pengambilan keputusan Iran (Ehteshami dan Hinnebusch 2023). Dengan demikian, pemulihan hubungan diplomatik pada tahun 2023 dapat dipahami sebagai hasil dari proses kebijakan luar negeri yang bertujuan mereduksi ancaman dan menyesuaikan kepentingan nasional Iran dalam konteks regional yang berubah.

1.2 Rumusan Masalah

Melalui segala penjelasan diatas, timbul sebuah pertanyaan dalam kajian karya tulis ini: “Mengapa Iran menjalin kembali hubungan dengan Arab Saudi?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi tiga tujuan; satu tujuan umum yang akan mendefinisikan tujuan penelitian ini *in general*, dan dua tujuan khusus yang akan mendefinisikan dua tujuan spesifik dari kajian ini. Dengan demikian, ketiga tujuan tersebut telah dijabarkan sebagai berikut:

1. Menganalisis kebijakan bilateral Arab Saudi dan Iran melalui pemulihan hubungan diplomatiknya pada tahun 2023 dengan mempertimbangkan konteks sejarah, situasi, dan kondisi dalam periode lima tahun.
2. Mengilustrasikan kegunaan teori keseimbangan ancaman realisme beraliran defensif sebagai instrumen dalam pendekatan sebuah kebijakan luar negeri melalui kebijakan pemulihan hubungan bilateral Arab Saudi dan Iran 2023.

3. Meneliti bagaimana faktor domestik dan faktor internasional, selaku sebagai dua variabel dalam aliran realisme, dapat mempengaruhi kebijakan pemulihan hubungan bilateral Arab Saudi dan Iran 2023.

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini berfokus pada hubungan bilateral Arab Saudi dan Iran pada tahun 2023 yang mana kebijakan pemulihan hubungan diplomatik kedua negara tersebut menjadi variabel yang akan difokuskan dalam karya tulis ini. Guna mengerucutkan cakupan analisis, kajian ini akan berfokus pada periode 2019-2023 dimana konteks sejarah atau kejadian-kejadian dalam kurun lima tahun tersebut akan dianalisis guna menspesifikkan lingkup kajian yang mana peristiwa-peristiwa dalam periode tersebut membangun ke arah pemulihan relasi diplomatik kedua negara di tahun 2023. Meskipun demikian, konteks historis relasi bilateral Arab Saudi dan Iran akan juga dikaji dengan tujuan melengkapkan proses penyelesaian karya tulis ini. Selain itu, penggunaan aliran realisme juga akan diaplikasikan dimana ilmu tersebut akan berfungsi sebagai pisau analisis.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini akan menggunakan beberapa sumber akademis dengan tujuan menunjang kemajuan analisis karya tulis ini. Dengan demikian, sumber akademis yang akan digunakan akan bertema secara relevan terhadap topik kajian. Berikut merupakan tiga tulisan yang akan direferensikan sebagai tinjauan pustaka dalam karya tulis ini:

Sumber akademis pertama yang akan digunakan sebagai tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah buku berjudul "*The Struggle for Supremacy in The Middle East: Saudi Arabia and Iran*" oleh Simon Mabon. Buku ini yang diterbitkan pada tahun 2023 memberi penjelasan yang rinci dalam sejarah hubungan Iran dan Arab Saudi dimana relasi mereka dibagi menjadi lima bagian; yang pertama membuka sejarahnya dari tahun 1932 hingga 1979 yang mana periode ini didefinisikan dengan adanya ketidakpercayaan antarnegara dan adanya keinginan untuk saling berinteraksi, yang kedua membentang dari tahun 1979-

1991 yang mana periode ini menjelaskan tentang relasi Iran dan Saudi setelah revolusi Khomeini dan perang Iran bersama Iraq, yang ketiga memfokuskan pada periode 1991-2003 ketika relasi mulai membaik karena didorong oleh kondisi domestik di Teluk, yang keempat melanjutkan penjelasannya dari tahun 2003-2011 yang mana relasi ini dihadapi oleh kebijakan “*War on Terror*” nya AS, dan akhirnya yang kelima menjelaskan tentang periode pasca peristiwa *Arab Spring* (Mabon, 2023). Buku ini sangat runtut dalam memaparkan sejarah dinamika bilateral Saudi dan Iran, buku ini tidaklah menjelaskan tentang kebijakan pemulihan relasi Saudi dan Iran.

Sumber akademis kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku berjudul *Saudi Arabia and Iran: Power and Rivalry in the Middle East* karya Banafsheh Keynoush yang diterbitkan pada tahun 2016. Karya ini membahas secara komprehensif dinamika hubungan Iran dan Arab Saudi dengan menempatkan kedua negara sebagai aktor regional yang saling memandang satu sama lain melalui lensa ancaman, kepentingan strategis, dan rivalitas kekuasaan. Keynoush menjelaskan bagaimana hubungan bilateral kedua negara dipengaruhi oleh kombinasi faktor ideologis, keamanan regional, serta dinamika politik internasional, termasuk keterlibatan aktor eksternal seperti Amerika Serikat dan negara-negara Teluk lainnya (Keynoush 2016). Meskipun buku ini tidak secara spesifik membahas pemulihan hubungan diplomatik Iran dan Arab Saudi pada tahun 2023, analisisnya memberikan landasan historis dan konseptual yang kuat untuk memahami akar rivalitas serta pola interaksi kedua negara. Namun demikian, karya ini lebih menekankan pada struktur hubungan dan dinamika jangka panjang, sehingga belum mengulas secara mendalam proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Iran dalam konteks perubahan lingkungan strategis mutakhir. Oleh karena itu, penelitian ini memanfaatkan karya Keynoush sebagai basis historis dan analitis, sekaligus melengkapinya dengan pendekatan teori proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri untuk menjelaskan kebijakan rekonsiliasi tahun 2023.

Sumber akademis ketiga yang akan digunakan sebagai tinjauan pustaka

dalam penelitian ini adalah sebuah artikel jurnal yang berjudul “*Saudi-Iran Relationship: The Beginning of a New Era*” karya Syed Umair Jalal, Yunas Khan, dan Ghulam Murtaza Pitafi. Karya tulis ini yang diterbitkan pada tahun 2023 memfokuskan kajiannya secara spesifik terhadap kebijakan pemulihan hubungan diplomatik Saudi dan Iran pada tahun 2023. Dalamnya, dijelaskanlah beberapa penyebab dibuatnya kebijakan tersebut dimana peristiwa-peristiwa pra-kebijakan terjadi dan peran faktor internasional menjadi variabel pendekatan. Berbeda dengan tinjauan pustaka sebelumnya, karya ini memberi penjelasan yang lebih detil terhadap potensi-potensi kedepan dari adanya kebijakan ini. Menurut kajiannya, kebijakan ini bukanlah hanya untuk kestabilan Timur Tengah melainkan juga untuk merepresentasikan dinamika ke masa depan yang damai dan sejahtera. Didalamnya ditambahkan juga bahwa kebijakan ini juga akan mempengaruhi negosiasi antara AS dan Iran serta AS dan Tiongkok di Timur Tengah (Jalal et al., 2023). Artikel jurnal ini rinci dalam menjelaskan potensi kedepan, karya tulis ini tidak berfokus dalam faktor domestik kedua negara sehingga tidak bersudut pandang secara realisme dan hanya menggunakan faktor internasional sebagai variabel.

1.6 Kerangka Pemikiran

Untuk mengetahui keputusan sebuah negara, kita wajib menempatkan diri kita di posisi negara tersebut (Morgenthau, 1948). Kalimat dari Morgenthau menyiratkan bahwa kita dapat memahami perilaku sebuah negara melalui akal pikiran yang rasional. Dalam konteks ini, rasionalitas negara yang dimaksud adalah pertimbangan untung-rugi dari tindakan negara dimana negara menjadi karakter utama dalam sudut pandangnya sendiri. Maka, tidak heran bila kita melihat negara berperilaku secara individualis egois, yang berarti negara akan tetap selalu mengedepankan survival negerinya dalam kancah internasional. Hal ini berlaku terhadap setiap negara di dunia, termasuk di Timur Tengah.

Melalui penekanan gagasan individualis egois, realisme memandang dunia sebagai satu tatanan yang anarki. Anarki yang dimaksud bukanlah situasi kerusuhan peradaban, melainkan kondisi dimana negara menjadi kesatuan aktor yang

keputusannya secara murni ada di tangan negara itu sendiri selaku sebagai aktor utama tanpa adanya keberadaan otoriter di atasnya (Forbes & Hoffman, 2016).

Berangkat dari konsep dasar Realisme yang menegaskan bahwa negara adalah satuan aktor di kancah internasional yang mana keberlangsungannya adalah fokus besar, kini dapat kita simpulkan bahwa negara tentunya juga mempertimbangkan berbagai faktor untuk menjadi tindakan selanjutnya yang benar. Melalui konsep realisme, dijelaskanlah bahwa negara mempertimbangkan faktor internasional dan juga faktor domestiknya sendiri untuk menentukan perilakunya kedepan dalam mendirikan sebuah kebijakan.

Dalam aliran realisme terdapat dua aliran yakni aliran ofensif dan defensif. Menurut Fareed Zakaria, aliran ofensif menegaskan bahwa negara dengan kekuatan yang besar dan meningkat seiring waktu cenderung melaksanakan ekspansionisme. Hal ini didasari oleh kapabilitas nasional sebuah negara yang mana beliau sebut sebagai teori “state-centered realism” (Zakaria, 1999).

Sedangkan itu, aliran defensif adalah kebalikan dari ofensif. Aliran defensif mengutamakan keamanan status quo atau kondisi sekarang daripada pembesaran kekuasaan. Bentuk aliran ini lalu dibungkuskan oleh Stephen Walt menjadi teori keseimbangan ancaman yang mana beliau menegaskan bahwa negara akan membentuk aliansi untuk menyeimbangkan keberadaannya dengan lingkungan sekitar bilamana kekuatannya belum tentu dapat mengungguli negara lain (Walt, 1985). Penelitian ini dielaborasi ke aliran defensif karena meskipun besar kekuatan ekonomi dan militernya, maka peluang untuk menyerang lebih besar juga. Meskipun demikian, keberlangsungan negara juga menjadi kekhawatiran terbesar di pendekatan realisme, dengan demikian penelitian ini beraliran defensif daripada ofensif.

Bila kita mencoba untuk mengaplikasikan teori ini terhadap kebijakan pemulihan hubungan diplomatik Saudi dan Iran, tampaknya kesesuaian dalam proses pendekatan yang mana dalam kasus ini kedua negara tidaklah mencoba untuk berekspansi melainkan mempertahankan status quo. Akan tetapi, dalam hal ini kedua negara tidaklah merancang aliansinya sendiri melainkan menggunakan alternatif lain yang datang dalam bentuk kompromi bersama yang mana kedua

pihak pada akhirnya saling bersetuju untuk menjaga stabilitas geopolitik Teluk. Analisis ini akan menggunakan teori keseimbangan ancaman karya Walt bersama dengan variabel faktor domestik dan internasional realisme sebagai pisau kajian dalam memahami dinamika hubungan Iran dan Saudi.

Dalam konteks hubungan Iran dan Arab Saudi, kekuatan menjadi faktor penting dalam meningkatkan persepsi ancaman di kawasan Teluk Persia. Iran memiliki populasi yang besar dan wilayah yang luas dengan sumber daya alam yang signifikan, terutama cadangan minyak dan gas. Selain itu, kemampuan ekonomi Iran didukung oleh industri energi yang kuat, meskipun terpengaruh oleh sanksi internasional. Di sisi lain, Arab Saudi memiliki kekuatan ekonomi yang kuat sebagai eksportir minyak terbesar di dunia, dengan anggaran militer yang besar untuk memodernisasi angkatan bersenjata. Kedua negara juga secara aktif mengembangkan kekuatan militer yang mencakup teknologi senjata canggih dan kemampuan rudal balistik. Dengan kekuatan yang besar dari kedua negara, persepsi ancaman timbal balik meningkat, yang mendorong keduanya untuk membentuk aliansi dengan kekuatan global guna menyeimbangkan kekuatan di kawasan tersebut.

1.7 Argumen Sementara

Dengan adanya kebijakan pemulihan hubungan diplomatik Saudi dan Iran 2023, dapat kita lihat bahwa kebijakan ini sedang dalam umur muda yang belum menunjukkan hasil yang besar. Selain itu munculnya kebijakan ini jugamerupakan sebuah topik yang belum dijelajahi sepenuhnya, khususnya melalui perspektif realisme. Mengenalinya betapa besarnya kebijakan ini terhadap politik Timur Tengah, karya tulis ini akan mencoba untuk menjelaskan dinamika pembentukannya kebijakan pemulihan hubungan diplomatik Saudi dan Iran melalui teori keseimbangan ancaman realisme yang mana faktor internasional dan domestik menjadi variabel kajian. Secara keseluruhan, hipotesis kajian ini berargumen bahwa kebijakan pemulihan relasi diplomatik Saudi danIran 2023 didasari oleh niat untuk menjaga *status quo* yang mana sesama negara memanfaatkan keseimbangan ancaman sebagai basis kebijakan dan bukan untuk mengakhiri.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Kajian yang digunakan dalam karya tulis ini diklasifikasikan sebagai kajian deskriptif. Menurut Creswell, kajian deskriptif merupakan metode pengumpulan informasi tentang kondisi yang ada saat ini (Creswell, 2017). Melalui penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa metode ini digunakan untuk mendeskripsikan sebuah fenomena, peristiwa, maupun tragedi yang sedang terjadi melalui pengumpulan data mengenai topik. Dengan demikian, memungkinkan sang penulis untuk secara akurat mengilustrasikan varietas karakteristik dalam analisis ini.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dan objek penelitian dapat secara sederhana dipahami sebagai pelaku sasaran penelitian dan fokus penelitian. Dalam kajian ini, pelaku sasaran penelitiannya adalah Arab Saudi dan Iran yang mana konteks dinamika hubungan mereka, faktor domestik, dan faktor internasionalnya menjadi variabel pengkajian. Sedangkan itu, objek dalam penelitian ini adalah kebijakan pemulihan hubungan diplomatik Arab Saudi dan Iran pada tahun 2023.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang ada dalam karya tulis ini menggunakan teknik “*library research*” atau riset perpustakaan. Dengan mempekerjakan teknik ini, karya tulis ini dapat dilaksanakan tanpa hadir secara fisik atau luring di lokasi topik yang sedang dikaji. Teknik ini mempromosikan penggunaan alat-alat elektronik dan nonelektronik untuk mengumpulkan data. Data yang dikumpulkan dalam karya tulis ini diklasifikasikan sebagai data primer dan sekunder. Data primer akan diperoleh melalui *statement-statement* pihak pertama dalam sebuah wawancara daring sedangkan data sekunder akan diperoleh melalui jurnal artikel, buku, maupun sumber-sumber data sekunder lainnya yang terpercaya.

1.8.4 Proses Penelitian

Penelitian ini diawali dengan mengidentifikasi permasalahan yang mendasar dan menetapkan tujuan penelitian. Selanjutnya penulis melakukan

pengumpulan data dan tinjauan pustaka terkait pertanyaan penelitian untuk memastikan kebaruan penelitian. Data yang dikumpulkan berasal dari berbagai publikasi yang relevan terhadap topik penelitian melalui berbagai *website*, artikel berita, serta platform sosial media. Data tersebut kemudian diolah, dianalisis dan disajikan dalam bentuk narasi pada bab dan sub bab. Kesimpulan penulis akan ditulis pada bab terakhir berdasarkan data yang dikumpulkan.

1.9 Sistematika Pembahasan

Penelitian dalam karya tulis ini akan dibagikan menjadi empat bab yakni bab pendahuluan, bab pengantar pembahasan, bab pembahasan inti, dan bab kesimpulan. Pada bab pertama, penelitian ini akan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, dan metode penelitian.

Sedangkan itu, bab kedua karya tulis ini akan menjelaskan tentang konteks dasar topik kajian seperti sejarah hubungan Arab Saudi dan Iran hingga kebijakan pemulihan relasi diplomatik. Selanjutnya, pembahasan dasar ini akan dikerucutkan dalam bab tiga yang mana teori *foreign policy decision making process*, yang didalamnya terdapat faktor domestik, kekuatan ekonomi, kekuatan militer, dan kekuatan geografis. Pada akhirnya dalam bab empat hasil kajian dan konklusi akan dipaparkan.

BAB II

Sejarah Iran dengan Arab Saudi

2.1 Konteks Historis Hubungan Iran dan Arab Saudi

Pemicu ketidakakuran Arab Saudi dan Iran salah satu terkait tentang masalah geografis, Arab Saudi dan Iran wilayahnya berdekatan dan sama mempunyai power yang kuat, persaingan ketat untuk mendominasi wilayah Timur Tengah. Selama lebih dari puluhan tahun yang menjadi pemicu utama adalah perbedaan antara diantara dua negara tersebut. Hubungan antara Iran dan Arab Saudi memiliki sejarah panjang yang diwarnai oleh dinamika kompleks, mulai dari kerja sama hingga rivalitas yang intens. Sejak era monarki di kedua negara, hubungan ini dipengaruhi oleh faktor geopolitik, ideologi agama, dan kepentingan ekonomi.

Pada era 1960-an dan 1970-an, hubungan Iran dan Arab Saudi relatif harmonis di bawah kepemimpinan Shah Iran Mohammad Reza Pahlavi dan Raja Faisal dari Arab Saudi. Kedua negara bekerja sama dalam kerangka organisasi seperti OPEC untuk mengelola produksi dan harga minyak global. Namun, Revolusi Islam Iran pada tahun 1979 menjadi titik balik dalam hubungan kedua negara. Ideologi revolusioner yang diusung oleh Iran, termasuk dukungan terhadap gerakan Islamis di kawasan, dipandang sebagai ancaman oleh Arab Saudi, yang berpegang pada ajaran Sunni Wahhabi (Mabon, 2015).

Ketegangan semakin meningkat pada 1980-an, terutama selama Perang Iran-Irak (1980-1988), di mana Arab Saudi mendukung Irak dengan dana dan senjata untuk melawan Iran. Konflik ini memperkuat rivalitas kedua negara sebagai wakil dari dua aliran utama Islam, Sunni dan Syiah. Ketegangan ini juga tercermin dalam insiden-insiden keagamaan, seperti kerusuhan selama musim haji pada 1987 yang menyebabkan kematian ratusan jemaah, termasuk warga Iran (Matthiesen, 2013).

Pada dekade berikutnya, hubungan tetap tegang meskipun ada upaya diplomasi. Arab Saudi mencurigai keterlibatan Iran dalam mendukung kelompok-kelompok Syiah di negara-negara seperti Lebanon dan Yaman. Sementara itu, Iran

menuduh Arab Saudi mendukung kelompok-kelompok Sunni radikal yang anti-Iran. Rivalitas ini semakin menonjol dalam konflik proxy di kawasan Timur Tengah, termasuk perang di Suriah dan Yaman (Terrill, 2011).

Pada bulan Mei 1998, Iran dan Arab Saudi menandatangani sebuah perjanjian penting yang dikenal sebagai *The Cooperation Agreement of 1998*. Kesepakatan ini merupakan hasil dari diskusi selama 14 bulan antara kedua negara. Perjanjian ini mencakup kolaborasi di berbagai bidang seperti ekonomi, perdagangan, investasi, ilmu pengetahuan, budaya, dan olahraga. Sebuah komite khusus juga dibentuk untuk mengadakan pertemuan secara berkala, guna memperkuat hubungan bilateral. Presiden Iran saat itu, Mohammad Khatami, menekankan bahwa penandatanganan ini bukanlah akhir dari proses, melainkan awal dari serangkaian kerja sama yang lebih luas antara kedua negara. Perjanjian ini juga berfungsi sebagai kerangka hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah perdagangan dan politik antara Iran dan Arab Saudi, memberikan instrumen legal dalam hubungan bilateral mereka melalui hukum perdagangan internasional (Altoraifi, 2012).

Hubungan ini semakin dikuatkan melalui kunjungan resmi Pangeran Saud al-Faisal, Menteri Luar Negeri Arab Saudi, ke Iran pada April 1999. Kunjungan dua hari tersebut diikuti oleh lawatan Pangeran Sultan, Menteri Pertahanan Arab Saudi, selama lima hari di bulan Mei. Kunjungan ini menjadi yang pertama kali sejak Revolusi Iran 1979. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas peningkatan kerja sama dalam perdagangan, budaya, dan penerbangan, serta penandatanganan perjanjian tambahan yang bertujuan untuk mempererat hubungan antarnegara (Cordesman & Burke).

Pada tahun 1999, Ketua Parlemen Iran, Nategh-Nouri, bersama dengan 95 anggota delegasi, melakukan kunjungan resmi ke Arab Saudi. Kunjungan ini bertujuan untuk menandatangani perjanjian kerja sama dengan Menteri Negara Arab Saudi. Sebagai tindak lanjut, Arab Saudi mengirim delegasi Majelis Permusyawaratan (*Majlis al-Shura*) ke Teheran untuk membangun Islamic Inter-Parliamentary Union. Delegasi tersebut dipimpin oleh Menteri Industri dan Listrik

Arab Saudi, Hashim Abdullah Yamani, dan berlangsung selama dua minggu. Kunjungan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi bersama di kedua negara (Keynoush, 2016).

Pada Januari 2000, Arab Saudi dan Iran menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi. Kesepakatan ini juga mencakup koordinasi posisi dalam organisasi internasional dan regional, serta kerja sama di bidang navigasi, pengembangan pelabuhan, dan urusan konsuler (Keynoush, 2016).

Meskipun hubungan kedua negara berjalan baik, sempat terjadi perbedaan pandangan dalam pertemuan OPEC pada Maret 2000. Arab Saudi mendorong peningkatan besar dalam kuota produksi minyak OPEC untuk menstabilkan harga dan memaksimalkan keuntungan. Namun, Iran yang telah mencapai batas maksimal kapasitas produksinya khawatir langkah tersebut akan merugikan perekonomiannya. Pada akhirnya, kebijakan yang diajukan oleh Arab Saudi diterapkan. Meski terjadi perbedaan pendapat, hal ini tidak memengaruhi hubungan baik antara kedua negara (Cordesman & Burke, 2001).

Hubungan Arab Saudi dan Iran setelah tahun 2001 diwarnai oleh dinamika persaingan geopolitik dan ideologis yang semakin intens. Pasca serangan 11 September 2001, fokus Amerika Serikat pada perang melawan terorisme dan invasi ke Irak (2003) mengubah lanskap politik Timur Tengah. Perubahan ini turut memengaruhi hubungan antara Arab Saudi dan Iran, dua kekuatan besar yang kerap bersaing memperebutkan pengaruh di kawasan. Invasi AS ke Irak menciptakan kekosongan kekuasaan yang dimanfaatkan Iran untuk memperluas pengaruhnya di Irak melalui dukungan terhadap kelompok Syiah. Hal ini dianggap sebagai ancaman langsung oleh Arab Saudi, yang mendukung pemerintahan Sunni di Timur Tengah. Rivalitas ini semakin jelas dalam konflik sektarian yang merebak di Irak setelah 2003 (Wehrey et al, 2017).

Ketegangan semakin meningkat pada 2011 dengan dimulainya Arab Spring, yang menciptakan gelombang protes di berbagai negara Arab. Iran dan

Arab Saudi mendukung pihak-pihak yang berlawanan dalam konflik regional yang muncul, seperti di Suriah, Bahrain, dan Yaman. Dalam perang saudara Suriah, Iran mendukung rezim Bashar al-Assad melalui pasokan senjata, penasihat militer, dan dukungan dari milisi Hizbullah. Sebaliknya, Arab Saudi mendukung kelompok pemberontak yang menentang Assad. Rivalitas ini juga terlihat jelas di Yaman, di mana Arab Saudi meluncurkan intervensi militer pada 2015 untuk melawan pemberontak Houthi yang didukung Iran (Mabon, 2015).

Pada 2016, hubungan kedua negara mencapai titik terendah ketika Arab Saudi mengeksekusi ulama Syiah Nimr al-Nimr, yang memicu protes keras di Iran. Kedutaan besar Arab Saudi di Teheran diserang oleh demonstran, dan sebagai tanggapan, Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran. Ketegangan diplomatik ini memperburuk konflik proxy di kawasan, termasuk perang di Suriah dan Yaman (Terrill, 2011).

Memasuki dekade 2020-an, upaya untuk meredakan ketegangan mulai terlihat. Pada 2021, Arab Saudi dan Iran memulai pembicaraan diplomatik yang dimediasi oleh Irak untuk memperbaiki hubungan bilateral. Kemajuan signifikan terjadi pada tahun 2023, ketika kedua negara sepakat untuk memulihkan hubungan melalui mediasi Tiongkok. Kesepakatan ini meliputi pembukaan kembali kedutaan besar di kedua negara, pemulihan hubungan diplomatik, serta komitmen untuk bekerja sama dalam menciptakan stabilitas regional. Perjanjian ini dianggap sebagai langkah penting untuk meredakan ketegangan sektarian dan konflik proksi yang telah berlangsung selama puluhan tahun (Ehteshami & Hinnebusch, 2023).

Meskipun sejarah hubungan Iran dan Arab Saudi pasca-2001 didominasi oleh persaingan geopolitik, upaya rekonsiliasi di awal 2020-an memberikan harapan bagi stabilitas Timur Tengah di masa depan. Kedua negara kini menghadapi tantangan bersama, seperti ancaman keamanan regional, harga minyak global, dan pengaruh negara-negara besar di kawasan. Teori pemetaan merupakan Pendekatan grafis digunakan untuk menganalisis situasi konflik, serupa dengan cara peta geografis merangkum wilayah dalam satu halaman. Peta konflik berfungsi menyederhanakan kompleksitas konflik dengan menyajikan

informasi secara visual mengenai para aktor yang terlibat, pengaruh mereka terhadap konflik, hubungan antaraktor, serta isu-isu utama yang menjadi sumber konflik (Kristanto, 2020).

2.2 Penyebab Konflik Iran dan Arab Saudi

Konflik Iran–Arab Saudi berakar pada kombinasi faktor identitas keagamaan, kontestasi geopolitik, serta keterlibatan aliansi global. Arab Saudi memosisikan dirinya sebagai pusat Islam Sunni dengan legitimasi religius sebagai penjaga dua kota suci, Mekkah dan Madinah. Doktrin Wahabi yang dianut secara resmi menekankan puritanisme dan kerap menolak praktik Syiah, sementara Iran pasca-Revolusi 1979 menegaskan diri sebagai pusat Syiah global dengan misi mengeksport ideologi revolusioner (Mabon, 2015). Identitas Wahabi di Arab Saudi berakar pada gerakan reformis abad ke-18 yang dipelopori Muhammad bin Abdul Wahhab, yang kemudian beraliansi dengan keluarga Saud. Ajaran ini menekankan pemurnian akidah dan menolak praktik-praktik yang dianggap bid'ah, termasuk sebagian besar tradisi Syiah. Posisi Saudi sebagai penjaga dua kota suci semakin memperkuat klaimnya sebagai pemimpin umat Islam Sunni di dunia.

Identitas Syiah Iran berakar pada keyakinan teologis mengenai kepemimpinan *Ahlul Bayt*, yaitu keluarga Nabi Muhammad SAW yang dipandang memiliki otoritas moral dan politik dalam memimpin umat Islam. Dalam tradisi Syiah, *Ahlul Bayt* merujuk pada garis keturunan Nabi melalui Ali bin Abi Thalib dan Fatimah az-Zahra, yang diyakini memiliki legitimasi kepemimpinan yang bersifat ilahiah dan berkesinambungan melalui para Imam (Nasr 2006). Revolusi Islam Iran pada tahun 1979 di bawah kepemimpinan Ayatollah Ruhollah Khomeini mempertegas dimensi politik Syiah dengan menginstitutionalisasi konsep *Wilayat al-Faqih*, yaitu doktrin yang menempatkan ulama Syiah sebagai pemegang otoritas tertinggi negara dalam rangka menjaga kepentingan agama dan masyarakat Islam. Dalam konteks ini, identitas keagamaan Syiah tidak hanya berfungsi sebagai keyakinan teologis,

tetapi juga sebagai fondasi legitimasi politik dan kebijakan luar negeri Iran. Sebaliknya, Arab Saudi menggunakan identitas Wahabi untuk memperkuat klaimnya sebagai pusat dunia Islam Sunni dan penjaga dua kota suci, Mekkah dan Madinah. Dengan demikian, identitas keagamaan di kedua negara bertransformasi menjadi instrumen politik luar negeri yang digunakan untuk membenarkan posisi, pengaruh, dan perlawanan terhadap dominasi Barat di kawasan Timur Tengah (Matthiesen 2013).

Perbedaan identitas ini melahirkan kecurigaan timbal balik: bagi Saudi, pengaruh Iran dianggap mengancam legitimasi keagamaannya; sedangkan bagi Iran, Saudi dipandang sebagai penghalang penyebaran ideologi Syiah dan sebagai sekutu Barat. Identitas sektarian ini tidak berhenti pada ranah teologis, melainkan membentuk persepsi politik yang memengaruhi cara kedua negara memandang satu sama lain. Saudi sering menilai ekspansi pengaruh Iran sebagai bentuk “intervensi Syiah” yang berbahaya bagi stabilitas kawasan Sunni, sedangkan Iran menuduh Saudi sebagai “rezim boneka” Amerika Serikat yang menghambat cita-cita revolusi Islam (Matthiesen, 2013). Pandangan saling mencurigai ini pada akhirnya memperkuat pola rivalitas dan memperdalam konflik di kawasan. Identitas sektarian dijadikan alat legitimasi bagi masing-masing negara untuk membenarkan kebijakan luar negeri yang konfrontatif. Bagi Saudi, setiap peningkatan pengaruh Iran di kawasan dianggap sebagai ancaman langsung terhadap stabilitas Sunni dan kepemimpinannya atas dunia Islam, sehingga memicu kebijakan intervensif, seperti keterlibatan militer di Yaman. Sementara bagi Iran, dominasi Saudi yang didukung Amerika Serikat dipersepsikan sebagai upaya membendung ekspansi ideologi revolusi Islam, sehingga mendorong Iran untuk aktif mendukung kelompok proksi Syiah di Lebanon, Suriah, dan Irak. Dengan demikian, perbedaan identitas tidak hanya melahirkan kecurigaan, tetapi juga menginstitusionalisasi konflik, menjadikannya sulit diredam meskipun ada upaya diplomasi (Nasr, 2006).

Rivalitas identitas ini kemudian berkelindan dengan kontestasi geopolitik, di mana Iran dan Saudi sama-sama berebut pengaruh di kawasan Timur Tengah,

baik melalui kontrol jalur energi penting seperti Selat Hormuz dan Laut Merah, maupun keterlibatan dalam konflik proksi di Yaman, Suriah, dan Lebanon. Pada titik inilah dimensi global semakin jelas Saudi sejak lama menjalin hubungan strategis dengan Amerika Serikat berbasis minyak dan keamanan, sedangkan Iran memperkuat hubungannya dengan Rusia sebagai mitra militer dan politik. Pola aliansi global ini membuat rivalitas Iran–Saudi tidak hanya menjadi konflik regional, melainkan bagian dari persaingan geopolitik internasional yang lebih luas (Terrill, 2011).

Konflik antara Arab Saudi dan Iran saat ini merupakan persaingan untuk memperebutkan dominasi di Timur Tengah. Kedua negara berupaya memperluas pengaruhnya di kawasan tersebut. Namun, di balik persetujuan ini, terdapat kekuatan besar yang turut terlibat. Arab Saudi didukung oleh Amerika Serikat, sedangkan Iran menjalin kerja sama dengan Rusia. Konflik ini mencerminkan bentuk perang proxy yang melibatkan dua negara adidaya dan menjadi salah satu peninggalan dari era Perang Dingin di masa lalu. (Machmudi, 2021).

Konflik antara Iran dan Arab Saudi tidak dapat dilepaskan dari dinamika identitas keagamaan serta rivalitas geopolitik di kawasan Timur Tengah. Dua faktor utama yang menjadi penyebab mendasar persetujuan ini adalah sektarianisme Sunni–Syiah dan geopolitik yang dipengaruhi aliansi Arab Saudi dengan Amerika Serikat. Kedua faktor ini saling terkait dan memperkuat permusuhan yang berlangsung selama beberapa dekade.

Sektarianisme Sunni–Syiah menjadi salah satu sumber ketegangan yang paling menonjol. Sejarah panjang perpecahan antara Sunni dan Syiah berakar dari persoalan politik pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW, ketika terjadi perbedaan pandangan mengenai siapa yang berhak memimpin umat Islam. Mayoritas umat Islam akhirnya mengikuti jalur Sunni dengan mengakui khalifah yang dipilih secara musyawarah, sementara kelompok Syiah berpegang pada keyakinan bahwa kepemimpinan harus berada di tangan keluarga Nabi melalui garis keturunan Ali bin Abi Thalib. Perbedaan historis ini tidak hanya menjadi persoalan teologis, tetapi kemudian berkembang menjadi identitas politik yang

kerap dimobilisasi untuk kepentingan kekuasaan di era modern.

Arab Saudi memposisikan dirinya sebagai pemimpin dunia Islam Sunni, terutama dengan statusnya sebagai penjaga dua kota suci, Mekkah dan Madinah. Sebaliknya, Iran dengan Revolusi Islam 1979 menegaskan diri sebagai pusat Syiah global dan berupaya mengeksport ideologi revolusioner ke kawasan. Hal ini menciptakan persaingan identitas keagamaan yang kuat. Bagi Saudi, pengaruh Iran dianggap mengancam legitimasi keagamaannya sebagai pemimpin umat Islam, sementara bagi Iran, peran Saudi dipandang sebagai penghalang bagi penyebaran ideologi Syiah dan revolusi Islam (Wehrey et al., 2017).

Persaingan sektarian tersebut semakin terlihat nyata dalam konflik-konflik proksi di Timur Tengah. Di Yaman, misalnya, Iran dituduh mendukung kelompok Houthi yang berafiliasi dengan Syiah Zaidiyah, sementara Arab Saudi memimpin koalisi militer untuk mendukung pemerintahan sah Yaman. Di Suriah, Iran mendukung rezim Bashar al-Assad yang beraliran Alawiyah (cabang Syiah), sedangkan Saudi mendukung kelompok oposisi Sunni. Pola dukungan ini memperlihatkan bagaimana sektarianisme digunakan sebagai instrumen politik luar negeri kedua negara. Dengan demikian, konflik Sunni–Syiah bukan semata-mata perbedaan keagamaan, melainkan bagian dari strategi geopolitik yang melibatkan perebutan pengaruh kawasan (Hikam, 2020).

Sektarianisme, faktor geopolitik dan aliansi Arab Saudi dengan Amerika Serikat juga memainkan peran kunci dalam memperuncing konflik Iran–Saudi. Sejak awal abad ke-20, Arab Saudi menjalin hubungan erat dengan Amerika Serikat yang dilandasi kepentingan minyak dan keamanan. Kerja sama tersebut diperkuat dengan doktrin bahwa Amerika akan melindungi Saudi dari ancaman eksternal sebagai imbalan atas akses terhadap pasokan energi. Kondisi ini menjadikan Saudi sebagai sekutu utama Amerika di Timur Tengah.

Iran memiliki dinamika hubungan yang berbeda. Pada masa sebelum Revolusi 1979, Iran di bawah Shah Mohammad Reza Pahlavi juga merupakan sekutu penting Amerika. Namun, setelah Revolusi Islam, hubungan Iran–AS memburuk drastis, ditandai dengan krisis penyanderaan di Kedutaan Besar AS

di Teheran. Sejak saat itu, Iran memosisikan dirinya sebagai kekuatan anti-Barat dan menentang dominasi Amerika di kawasan. Kebijakan luar negeri Iran yang berlawanan dengan kepentingan AS otomatis menempatkannya dalam posisi konfrontatif dengan Arab Saudi sebagai sekutu utama AS.

Geopolitik energi juga memperkuat rivalitas kedua negara. Baik Iran maupun Saudi merupakan produsen minyak terbesar di dunia dan memiliki pengaruh besar dalam organisasi OPEC. Kontrol terhadap harga minyak dunia seringkali menjadi ajang pertarungan kepentingan. Saudi, dengan dukungan AS, kerap menggunakan kebijakan produksi minyak untuk melemahkan perekonomian Iran, khususnya ketika negara tersebut dikenai sanksi internasional. Sebaliknya, Iran berusaha mencari celah melalui aliansi dengan negara-negara yang menentang dominasi AS, seperti Rusia dan Tiongkok, guna menyeimbangkan kekuatan di kawasan.

Aliansi Saudi dengan AS juga terlihat dalam konteks keamanan kawasan, khususnya menghadapi isu program nuklir Iran. Bagi Arab Saudi, upaya Iran mengembangkan teknologi nuklir dipandang sebagai ancaman eksistensial. Dukungan AS terhadap Saudi dalam menentang program nuklir Iran mempertegas garis pemisah geopolitik antara kedua negara. Hal ini juga mendorong terbentuknya blok-blok politik yang saling berhadapan: blok pro-AS yang dipimpin Saudi versus blok anti-AS yang digerakkan Iran. Rivalitas tersebut semakin kompleks dengan adanya keterlibatan kekuatan eksternal lain, seperti Rusia yang mendukung Iran dalam konflik Suriah, sehingga konflik Iran–Saudi melampaui isu bilateral dan menjadi bagian dari kontestasi global.

Dari uraian di atas, jelas bahwa penyebab konflik Iran–Saudi bukanlah faktor tunggal, melainkan kombinasi antara identitas sektarian dan kalkulasi geopolitik. Sektarianisme Sunni–Syiah berfungsi sebagai basis ideologis yang memberi legitimasi pada masing-masing negara untuk mengklaim peran sebagai pemimpin dunia Islam. Sementara itu, aliansi Saudi dengan AS menghadirkan dimensi geopolitik yang memperkuat rivalitas tersebut. Kedua faktor ini berinteraksi secara dinamis: sektarianisme menyediakan narasi ideologis,

sedangkan geopolitik menyediakan instrumen kekuatan dalam bentuk dukungan militer, ekonomi, dan diplomatik.

Konflik Iran–Arab Saudi membutuhkan analisis yang memadukan dimensi identitas keagamaan dan geopolitik melalui kerangka proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Dalam teori *foreign policy decision making process* yang dikemukakan oleh William D. Coplin, kebijakan luar negeri suatu negara dipahami sebagai hasil interaksi antara faktor domestik, faktor internasional, serta persepsi elite pengambil keputusan terhadap ancaman dan peluang yang dihadapi negara tersebut (Coplin 1992). Dalam konteks hubungan Iran dan Arab Saudi, konflik tidak hanya dibentuk oleh distribusi kekuatan material, tetapi juga oleh bagaimana masing-masing negara menafsirkan identitas, kepentingan, dan tekanan eksternal dalam proses perumusan kebijakan luar negerinya.

Bagi Arab Saudi, Iran dipersepsikan sebagai ancaman karena kapasitas militernya, ideologi revolusioner pasca-1979, serta orientasi politik luar negeri Iran yang berseberangan dengan kepentingan Amerika Serikat sebagai mitra strategis Saudi. Persepsi ini membentuk sikap kebijakan luar negeri Saudi yang cenderung konfrontatif dan defensif terhadap Iran dalam berbagai isu regional. Sebaliknya, Iran memandang Arab Saudi sebagai ancaman karena posisinya sebagai sekutu utama Amerika Serikat di Timur Tengah serta perannya dalam membatasi pengaruh politik dan ideologis Iran di kawasan. Persepsi ancaman ini memengaruhi preferensi kebijakan luar negeri Iran dalam mendukung aktor-aktor regional yang berseberangan dengan kepentingan Saudi (Gause 2014; Keynoush 2016).

Konflik Iran–Arab Saudi dengan demikian tidak dapat dipahami semata-mata sebagai perseteruan agama atau persaingan energi, melainkan sebagai konflik multidimensi yang terbentuk melalui proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri masing-masing negara. Identitas sektarian, kepentingan geopolitik, tekanan domestik, serta dinamika lingkungan internasional saling berinteraksi dalam membentuk persepsi elite politik dan menentukan arah

kebijakan luar negeri. Analisis ini menjadi penting untuk menjelaskan mengapa hubungan kedua negara tetap tegang meskipun terdapat berbagai upaya diplomasi di masa lalu. Selain itu, pemahaman terhadap proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri juga krusial untuk menganalisis latar belakang pemulihan hubungan diplomatik pada tahun 2023, yang dapat dipahami sebagai hasil dari perubahan persepsi elite Iran terhadap ancaman dan peluang dalam lingkungan regional yang berubah (Coplin 1992).

BAB III

Analisis Iran Menjalin Kembali Hubungan dengan Arab Saudi

Teori proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri (*foreign policy decision making process*) yang dikemukakan oleh William D. Coplin memandang kebijakan luar negeri sebagai hasil dari interaksi berbagai faktor yang memengaruhi pilihan elite politik suatu negara. Coplin menegaskan bahwa kebijakan luar negeri tidak ditentukan secara otomatis oleh struktur sistem internasional, melainkan dibentuk melalui proses penilaian dan interpretasi aktor pengambil keputusan terhadap lingkungan domestik dan internasional yang dihadapinya (Coplin 1992). Dalam kerangka ini, negara bertindak berdasarkan persepsi terhadap ancaman, peluang, serta keterbatasan yang memengaruhi kepentingan nasionalnya.

Coplin mengidentifikasi tiga kelompok faktor utama yang membentuk proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Pertama, faktor domestik, yang mencakup kondisi ekonomi, stabilitas politik, ideologi, serta tekanan dari kelompok internal yang berpengaruh. Kedua, faktor internasional, yang meliputi distribusi kekuatan regional, hubungan dengan negara lain, konflik kawasan, serta tekanan dari aktor eksternal. Ketiga, faktor persepsi pengambil keputusan, yaitu bagaimana elite politik menafsirkan ancaman, peluang, dan risiko berdasarkan pengalaman, nilai ideologis, serta tujuan strategis negara (Coplin 1992). Ketiga faktor ini saling berinteraksi dan menentukan arah kebijakan luar negeri yang diambil suatu negara dalam merespons perubahan lingkungan strategis.

Hubungan Iran dan Arab Saudi, pendekatan Coplin relevan untuk menjelaskan kebijakan pemulihan hubungan diplomatik pada tahun 2023. Rivalitas ideologis, konflik proksi di kawasan Timur Tengah, serta tekanan ekonomi akibat sanksi internasional membentuk lingkungan strategis yang kompleks bagi Iran. Pada saat yang sama, Arab Saudi juga menghadapi tantangan keamanan regional dan kebutuhan stabilitas domestik untuk mendukung agenda transformasi ekonominya. Kondisi ini mendorong kedua negara untuk meninjau ulang orientasi kebijakan luar negeri mereka melalui proses pengambilan

keputusan yang mempertimbangkan biaya dan risiko dari kelanjutan konfrontasi.

Bagi Iran, kebijakan pemulihan hubungan dengan Arab Saudi dapat dipahami sebagai hasil dari perubahan persepsi elite politik terhadap ancaman dan peluang yang ada. Tekanan ekonomi domestik, isolasi diplomatik, serta dinamika konflik regional mendorong Iran untuk mengadopsi kebijakan luar negeri yang lebih pragmatis. Normalisasi hubungan dipandang sebagai instrumen untuk menurunkan ketegangan regional, memperluas ruang diplomasi, dan menciptakan lingkungan eksternal yang lebih kondusif bagi kepentingan nasional Iran. Dengan demikian, melalui kerangka teori Coplin, pemulihan hubungan diplomatik Iran–Arab Saudi pada tahun 2023 dapat dianalisis sebagai produk dari proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri yang dipengaruhi oleh faktor domestik, internasional, dan persepsi elite politik Iran terhadap perubahan lingkungan strategis.

3.1 Faktor Domestik

Dalam teori proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri William D. Coplin, faktor domestik merupakan salah satu variabel utama yang memengaruhi arah kebijakan luar negeri suatu negara. Faktor domestik mencakup kondisi ekonomi nasional, stabilitas politik internal, ideologi negara, serta tekanan dari aktor-aktor domestik yang memiliki pengaruh terhadap elite pengambil keputusan. Kebijakan luar negeri tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan negara untuk menjaga stabilitas internal dan memenuhi kepentingan nasional di dalam negeri (Coplin 1992).

Iran dalam kondisi domestik memainkan peran penting dalam mendorong perubahan orientasi kebijakan luar negeri menjelang pemulihan hubungan diplomatik dengan Arab Saudi pada tahun 2023. Tekanan ekonomi akibat sanksi internasional yang berkepanjangan telah berdampak signifikan terhadap perekonomian Iran, termasuk penurunan nilai mata uang, inflasi tinggi, serta keterbatasan akses terhadap pasar global. Situasi ini menciptakan tekanan internal bagi pemerintah Iran untuk mencari alternatif kebijakan luar negeri yang lebih

pragmatis guna meredakan beban ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan domestik (Ehteshami dan Hinnebusch 2023).

Stabilitas politik domestik juga menjadi pertimbangan penting dalam proses pengambilan keputusan Iran. Ketegangan sosial yang muncul akibat kesulitan ekonomi dan tuntutan masyarakat terhadap perbaikan kondisi hidup mendorong elite politik Iran untuk menghindari eskalasi konflik eksternal yang berpotensi memperburuk situasi internal. Dalam kerangka Coplin, elite pengambil keputusan cenderung memilih kebijakan luar negeri yang mampu meminimalkan risiko domestik dan menjaga legitimasi politik di dalam negeri (Coplin 1992).

Faktor ideologis juga tetap berperan dalam kebijakan luar negeri Iran, namun mengalami penyesuaian dalam praktiknya. Meskipun Iran tetap mempertahankan identitas ideologisnya sebagai negara Republik Islam, kebijakan luar negeri yang terlalu konfrontatif terhadap negara-negara regional dinilai tidak lagi sepenuhnya sejalan dengan kepentingan domestik jangka panjang. Oleh karena itu, pemulihan hubungan dengan Arab Saudi dipandang sebagai langkah strategis untuk menciptakan lingkungan regional yang lebih stabil tanpa harus mengorbankan prinsip ideologis utama negara (Keynoush 2016).

Dengan demikian, melalui perspektif Coplin, kebijakan Iran untuk menjalin kembali hubungan diplomatik dengan Arab Saudi dapat dipahami sebagai hasil dari pertimbangan domestik yang rasional. Tekanan ekonomi, kebutuhan stabilitas politik internal, serta upaya menjaga legitimasi elite politik mendorong Iran untuk menyesuaikan kebijakan luar negerinya. Normalisasi hubungan ini menjadi instrumen kebijakan luar negeri yang digunakan Iran untuk mereduksi tekanan domestik sekaligus menciptakan ruang manuver yang lebih luas dalam menghadapi dinamika regional dan internasional.

3.2 Kekuatan Ekonomi

Dalam teori proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri William D. Coplin, faktor ekonomi dipahami sebagai bagian dari lingkungan domestik dan internasional yang membatasi sekaligus membentuk pilihan kebijakan luar negeri

suatu negara. Kondisi ekonomi tidak berfungsi sebagai indikator ancaman langsung, melainkan sebagai variabel struktural yang memengaruhi preferensi elite pengambil keputusan dalam merespons tekanan eksternal dan menentukan prioritas kebijakan luar negeri (Coplin 1992).

Dalam konteks Iran, kondisi ekonomi nasional menjadi salah satu faktor penting yang mendorong perubahan orientasi kebijakan luar negeri menjelang pemulihan hubungan diplomatik dengan Arab Saudi pada tahun 2023. Produk Domestik Bruto (GDP) digunakan dalam penelitian ini sebagai indikator umum untuk menggambarkan kapasitas ekonomi negara dan ruang fiskal yang dimiliki pemerintah dalam menopang kebijakan domestik maupun eksternal. Data GDP nominal Iran dan Arab Saudi pada periode 2019–2023 menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi yang signifikan antara kedua negara.

Tahun	Iran (US\$ miliar)	Arab Saudi (US\$ miliar)
2019	458	792
2020	239	701
2021	357	833
2022	388	1.108
2023	413	1.237

Tabel 3. 1 Kekuatan Ekonomi Bruto Iran vs Arab Saudi

Sumber : World Bank (2024); IMF (2024); OPEC (2024)

Data tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Iran mengalami tekanan serius, terutama pada tahun 2020 ketika GDP Iran turun drastis akibat pandemi COVID-19 dan sanksi internasional yang membatasi perdagangan, investasi, serta akses ke sistem keuangan global. Meskipun terjadi pemulihan bertahap setelah 2021, kapasitas ekonomi Iran tetap berada jauh di bawah Arab Saudi, yang justru mengalami peningkatan signifikan seiring kenaikan harga energi global dan stabilitas ekspor minyak. Kesenjangan ekonomi ini membentuk konteks struktural yang penting dalam proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Iran.

Dalam kerangka Coplin, keterbatasan ekonomi domestik meningkatkan sensitivitas elite pengambil keputusan terhadap biaya kebijakan luar negeri yang bersifat konfrontatif. Konflik proksi yang berkepanjangan di Yaman, Suriah, dan Lebanon tidak hanya berdampak pada stabilitas kawasan, tetapi juga menguras sumber daya ekonomi Iran secara tidak langsung melalui dukungan terhadap aktor-aktor non-negara. Situasi ini mempersempit ruang manuver kebijakan luar negeri Iran dan mendorong kebutuhan untuk mengurangi tekanan eksternal melalui pendekatan diplomatik yang lebih pragmatis (Ehteshami dan Hinnebusch 2023).

Kekuatan ekonomi Arab Saudi memberikan keunggulan struktural dalam hubungan bilateral, namun juga menciptakan kepentingan domestik tersendiri bagi Riyadh. Ketergantungan Arab Saudi pada stabilitas regional untuk mendukung agenda transformasi ekonomi Vision 2030 mendorong Saudi untuk mengurangi eskalasi konflik dengan Iran. Dengan demikian, kondisi ekonomi kedua negara membentuk kalkulasi kebijakan luar negeri yang saling terkait, di mana konfrontasi berkelanjutan dipandang semakin tidak menguntungkan bagi kepentingan nasional masing-masing pihak.

Melalui perspektif Coplin, pemulihan hubungan diplomatik Iran–Arab Saudi pada tahun 2023 dapat dipahami sebagai respons rasional terhadap tekanan ekonomi yang dihadapi Iran serta kebutuhan untuk menciptakan lingkungan regional yang lebih stabil. Faktor ekonomi tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dengan faktor politik dan persepsi elite dalam membentuk keputusan kebijakan luar negeri Iran untuk mengurangi ketegangan dan membuka peluang diplomasi regional.

3.3 Kekuatan Militer

Dalam teori proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri William D. Coplin, kekuatan militer tidak dipahami sebagai indikator ancaman objektif semata, melainkan sebagai faktor struktural internasional yang memengaruhi persepsi elite pengambil keputusan dalam merumuskan kebijakan luar negeri.

Kapasitas militer suatu negara menjadi variabel penting karena membentuk lingkungan strategis, meningkatkan risiko konflik, serta memengaruhi kalkulasi biaya dan manfaat dari kebijakan konfrontatif maupun kooperatif (Coplin 1992).

Aspek	Iran	Arab Saudi
Militer	Tentara aktif: ±610.000 Kekuatan nuklir: program nuklir berkembang, belum dinyatakan memiliki senjata nuklir	Tentara aktif: ±233.000 Kekuatan nuklir: tidak ada
Populasi	±86,2 juta jiwa	±36,4 juta jiwa

Tabel 3. 2 Kekuatan Iran vs Arab Saudi

Sumber: Global Firepower (2025); IAEA (2023); SIPRI (2024); United Nations (2024)

Dalam konteks hubungan Iran dan Arab Saudi, kekuatan militer kedua negara membentuk tekanan strategis yang berkelanjutan dan mendorong keduanya untuk meninjau ulang orientasi kebijakan luar negeri masing-masing. Iran memiliki jumlah personel militer aktif yang besar, diperkirakan mencapai sekitar 610.000 personel, ditambah kekuatan cadangan dan paramiliter yang signifikan. Selain itu, pengembangan program nuklir Iran, meskipun belum secara resmi menghasilkan senjata nuklir, meningkatkan sensitivitas keamanan regional dan memicu kekhawatiran internasional (SIPRI 2024; IAEA 2023). Kapasitas militer Iran diperkuat oleh strategi asimetris melalui dukungan terhadap kelompok non-negara di kawasan seperti Hizbullah di Lebanon dan Houthi di Yaman.

Arab Saudi memiliki jumlah personel militer aktif yang lebih kecil, sekitar 233.000 personel, namun unggul dalam modernisasi persenjataan dan teknologi militer. Keunggulan ini tidak terlepas dari hubungan strategis Arab Saudi dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya yang menyediakan dukungan persenjataan, pelatihan, dan intelijen. Kapasitas militer Saudi dirancang untuk mempertahankan stabilitas domestik dan melindungi kepentingan strategisnya,

terutama infrastruktur energi yang vital bagi perekonomian nasional (SIPRI 2024).

Perbedaan karakter kekuatan militer ini menciptakan dinamika keamanan yang kompleks dalam proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Iran. Bagi elite politik Iran, eskalasi konflik militer secara langsung dengan Arab Saudi berisiko memicu keterlibatan aktor eksternal dan memperbesar tekanan internasional, termasuk sanksi tambahan. Dalam kerangka Coplin, kondisi ini meningkatkan kecenderungan pengambil keputusan Iran untuk mencari alternatif kebijakan luar negeri yang mampu menurunkan risiko konflik terbuka tanpa harus mengorbankan kepentingan strategis utama negara.

Dengan demikian, pemulihan hubungan diplomatik Iran–Arab Saudi pada tahun 2023 dapat dipahami sebagai respons terhadap lingkungan militer regional yang semakin tidak menguntungkan bagi konfrontasi terbuka. Ketimpangan modernisasi militer, risiko eskalasi konflik proksi, serta potensi keterlibatan kekuatan eksternal mendorong elite politik Iran untuk memilih jalur diplomasi sebagai instrumen kebijakan luar negeri yang lebih rasional. Dalam perspektif Coplin, kekuatan militer berfungsi sebagai faktor internasional yang membatasi pilihan kebijakan dan mendorong keputusan untuk mereduksi ketegangan melalui normalisasi hubungan diplomatik.

Kekuatan ofensif suatu negara merujuk pada kemampuan taktis dan strategis untuk mengerahkan sumber dayanya, seperti kapabilitas militer dan keuntungan geografis, dalam upaya menyerang atau memengaruhi negara lain. Potensi ancaman dari kekuatan ofensif ini dapat merusak kedaulatan dan integritas sebuah negara, menciptakan kebutuhan mendesak untuk merespons ancaman tersebut. Negara yang menghadapi kekuatan ofensif sering kali terdorong untuk melakukan balancing, yaitu membentuk aliansi atau memperkuat kemampuan domestik untuk menyeimbangkan ancaman. Namun, dalam kondisi tertentu, khususnya ketika jauh dari sekutu potensial dan berdekatan dengan negara dengan kekuatan ofensif yang mengancam, negara tersebut dapat terpaksa mengambil strategi bandwagoning, yaitu bekerja sama dengan sumber ancaman untuk meredam dampak yang lebih buruk.

Dalam hubungan Iran dan Arab Saudi, kekuatan ofensif memainkan peran penting dalam dinamika ketegangan di antara kedua negara. Iran memiliki kemampuan ofensif yang signifikan melalui jaringan proksi bersenjata, seperti kelompok Houthi di Yaman, yang sering melancarkan serangan rudal balistik dan drone ke wilayah Arab Saudi. Serangan-serangan ini tidak hanya menargetkan infrastruktur penting seperti fasilitas minyak tetapi juga menciptakan ketidakstabilan di kawasan Teluk Persia. Di sisi lain, Arab Saudi merespons ancaman ini dengan memperkuat kemampuan militernya, termasuk investasi besar-besaran dalam sistem pertahanan udara dan teknologi anti-drone.

Ancaman dari kekuatan ofensif Iran membuat Arab Saudi harus mengambil langkah-langkah proaktif untuk melindungi kedaulatan dan integritas wilayahnya. Namun, respons ini tidak hanya terbatas pada tindakan militer. Arab Saudi juga berupaya menjalin aliansi dengan sekutu regional dan internasional, seperti Amerika Serikat, untuk menyeimbangkan ancaman yang ditimbulkan oleh Iran. Di sisi lain, Iran, meskipun memiliki kekuatan ofensif yang tangguh, juga menyadari bahwa ketegangan yang berkelanjutan akan menguras sumber daya dan membatasi pengaruhnya di kawasan.

Rekonsiliasi antara kedua negara yang dimediasi oleh Tiongkok pada 2023 mencerminkan perubahan strategi dalam menghadapi kekuatan ofensif masing-masing. Baik Iran maupun Arab Saudi tampaknya menyadari bahwa melanjutkan konflik hanya akan meningkatkan risiko kehancuran tanpa memberikan keuntungan strategis yang nyata. Dengan menjalin kembali hubungan diplomatik, kedua negara berupaya menciptakan stabilitas yang dapat mengurangi ancaman dari kekuatan ofensif di kawasan.

Dengan adanya rekonsiliasi ini membuka peluang untuk mengalihkan fokus dari konflik militer ke kerja sama ekonomi dan politik, yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi kedua negara. Iran dan Arab Saudi, meskipun tetap waspada terhadap potensi ancaman satu sama lain, kini memiliki insentif yang lebih besar untuk mengelola perbedaan mereka melalui dialog daripada melalui kekuatan. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman strategis bahwa stabilitas

kawasan Teluk Persia adalah kepentingan bersama yang tidak bisa diabaikan. Kekuatan ofensif menjadi faktor penting yang mendorong rekonsiliasi ini, baik sebagai ancaman yang harus diatasi maupun sebagai peluang untuk menciptakan hubungan yang lebih stabil dan konstruktif. Mengurangi risiko konflik langsung tetapi juga membuka jalan kerja sama luas di kawasan di tingkat global.

Secara kuantitatif, Iran memiliki kekuatan militer yang signifikan, dengan Angkatan Darat berkekuatan 610.000 personel aktif (peringkat 9 dunia) dan 350.000 cadangan. Angkatan Darat mereka telah berevolusi menjadi kekuatan yang modern, dinamis, dan sangat mobile, dengan peningkatan kemampuan siber serta koordinasi yang erat dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).

Angkatan Laut Iran (IRIN) memiliki lebih dari 18.500 personel dan lebih dari 100 kapal, mencakup perusak modern (seperti Zulfiqar, Sahand, Zagros), fregat (Alphand, Moj-class), kapal serbu amfibi, korvet, dan armada kapal selam yang substansial (19-27 unit), termasuk tiga kapal selam kelas Kilo buatan Rusia, dua kapal selam kelas Fateh, dan banyak kapal selam mini kelas Ghadir yang lincah di perairan dangkal. Angkatan Laut Garda Revolusi (IRGCN) berfokus pada perang asimetris, menggunakan kapal serang cepat, ranjau laut (diperkirakan 5.000-6.000 unit), drone, dan taktik serangan kawanan, terutama di Selat Hormuz. Pada Agustus 2024, Iran juga menerima 2.640 sistem rudal dan drone angkatan laut, termasuk rudal jelajah yang tidak dapat dilacak radar.

Arab Saudi di sektor AD memiliki 1.062 tank perang. Selain itu, 11,1 ribu kendaraan perang membuat Arab Saudi menempati peringkat 4 di seluruh dunia. AD juga memiliki 705 artileri otomatis, 1,8 ribu artileri manual, dan 122 proyektor roket. Peralatan militer AD Arab Saudi dari tahun 1930-an hingga sekarang terangkum dalam Military Factory. Militer AL diperkuat dengan kepemilikan 7 frigate, 4 korvet, 9 kapal pengintai, dan 3 pangkalan perang. Sementara itu, jumlah helikopter yang dimiliki AU Arab Saudi adalah sebanyak 254 buah, 34 di antaranya adalah helikopter penyerang. Untuk menunjang kemiliteran, minyak merupakan faktor penting bagi Arab Saudi. Kemiliteran Arab Saudi mengonsumsi 3 juta barel dari total produksi dalam negeri 10,13 juta barel per hari.

Aspek Militer	Iran	Arab Saudi
Personel Militer Aktif	±537.000 – 873.000 Personel	±233.000 – 230.000 Personel
Pesawat Tempur	±137 – 509 Unit	±155 – 848 Unit
Helikopter Tempur	±137 – 509 Unit	±18 Unit
Kapal Perang	±32 Unit (termasuk kapal selam dan fast attack craft)	±3 Unit kapal besar, lebih banyak frigat dan korvet
Tank Tempur Darat	±32 Unit (termasuk kapal selam dan fast attack craft)	±1.062–1.210 Unit

Tabel 3. 3 Kekuatan Ofensif Iran dan Arab Saud

Sumber : Global Firepower (2025); SIPRI (2024); IISS (2024)

Data tersebut memperlihatkan bahwa Iran unggul dari sisi jumlah personel dan kekuatan laut asimetris, khususnya kapal selam dan armada cepat yang cocok untuk operasi di Teluk Persia dan Selat Hormuz. Sebaliknya, Arab Saudi lebih unggul dalam kualitas peralatan ofensif, terutama Angkatan Udara yang didukung pesawat tempur modern seperti F-15SA, Eurofighter Typhoon, dan Tornado, serta armada laut dengan fregat dan korvet berteknologi tinggi. Perbedaan ini menjelaskan bagaimana persepsi ancaman terbentuk: bagi Saudi, kekuatan laut Iran di Teluk Persia dipandang sebagai ancaman langsung terhadap jalur perdagangan energi; sementara bagi Iran, superioritas udara Saudi yang ditopang Amerika Serikat dipersepsikan sebagai faktor dominan yang dapat melemahkan posisi strategisnya. Dengan demikian, perbandingan ini menegaskan relevansi kemampuan ofensif dalam menjelaskan rivalitas Iran–Saudi di Timur Tengah

Matra	Iran		Arab Saudi	
	Kemampuan Ofensif	Kemampuan Defensif	Kemampuan Ofensif	Kemampuan Defensif
AU	Rudal balistik /krus domestik & armada UAV untuk serangan jarak jauh dan penyangkalan akses kawasan	IADSberlapis (S-300,Bavar-373) untuk menahan serangan udara	F-15SA, Eurofighter (dukungan AEW&C/tanker) proyeksi kekuatan udara presisi	Patriot PAC3/THAAD pertahanan berlapis terhadap rudal balistik & UAV
AL	A2/AD asimetris: kapal cepat, kapal selam, ranjau, rudal anti-kapal di Selat Hormuz & pesisir	Radar pesisir & UAV maritim untuk deteksi dini di chokepoints	Modernisasi RSNF (frigat/korvet) untuk pengamanan SLOC & fasilitas energi	Integrasi pertahanan pesisir CIWS/SHORAD untuk pelabuhan/infrastruktur maritim
AD	Korps rudal & UAV loitering untuk serangan jarak menengah	Pertahanan titik + mobile SAM melindungi aset kritis	AD lebih kecil namun terintegrasi intelijen & dukungan udara operasi gabungan efisien	Integrasi pertahanan pesisir CIWS/SHORAD untuk pelabuhan/infrastruktur maritim

Tabel 3. 4 Komparasi MatraPostur Ofensif–Defensif

Sumber: IISS (2024); SIPRI (2024); CSIS (2023); U.S. Department of Defense (2023); RAND Corporation (2022); Middle East Institute (2023)

Kedua negara menyadari bahwa dengan postur pertahanan yang telah terbentuk, konfrontasi langsung akan menghasilkan biaya politik, ekonomi, dan militer yang sangat besar. Iran memiliki strategi A2/AD (Anti-Access/Area Denial) berbasis rudal balistik, drone, dan kapal cepat untuk menekan kekuatan udara serta laut Arab Saudi di Teluk Persia. Sebaliknya, Arab Saudi memperkuat sistem pertahanan udara berlapis Patriot PAC-3, THAAD, dan Pantsir-S1M untuk melindungi infrastruktur energi vitalnya. Postur pertahanan semacam ini menciptakan situasi *mutual deterrence* di mana kedua pihak memiliki kemampuan menyerang sekaligus risiko kerugian tinggi apabila perang terbuka terjadi (IISS, 2024; CSIS, 2023).

Selain faktor militer, kalkulasi rasional juga menjadi pendorong utama bagi keputusan untuk memilih rekonsiliasi. Mediasi Tiongkok pada 2023 menyediakan jalur diplomatik yang memungkinkan keduanya mengurangi tekanan eksternal dan risiko ekonomi. Arab Saudi berkepentingan menjaga stabilitas untuk mendukung agenda Vision 2030, termasuk menarik investasi asing dan mendiversifikasi ekonomi dari ketergantungan minyak. Di sisi lain, Iran membutuhkan lingkungan regional yang lebih damai untuk mengurangi isolasi akibat sanksi dan membuka kembali akses perdagangan (Middle East Institute, 2023; Garlick & Havlová, 2020).

3.4 Kekuatan Geografis

Dalam teori proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri William D. Coplin, faktor geografis dipahami sebagai bagian dari lingkungan internasional yang membentuk persepsi elite pengambil keputusan terhadap risiko, peluang, dan keterbatasan kebijakan luar negeri. Letak geografis suatu negara tidak secara otomatis menciptakan ancaman, tetapi memengaruhi cara negara menilai potensi eskalasi konflik, biaya keamanan, serta dampak strategis dari kebijakan luar negeri yang diambil (Coplin 1992).

Iran dan Arab Saudi memiliki posisi geografis yang berdekatan di kawasan

Timur Tengah, khususnya di sekitar Teluk Persia, yang merupakan salah satu wilayah paling strategis dalam perdagangan energi global. Kedua negara tidak berbatasan darat secara langsung, namun saling berhadapan melalui perairan Teluk Persia dan memiliki kepentingan yang tumpang tindih di jalur-jalur maritim strategis. Kedekatan geografis ini meningkatkan sensitivitas keamanan karena setiap eskalasi konflik di kawasan tersebut berpotensi berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi dan politik kedua negara.



Gambar 3. 1 Jalur Energi Strategis dan Titik Konflik Geopolitik Iran–Arab Saudi

Sumber: U.S. Energy Information Administration (EIA), 2023

Keterangan:

Posisi Iran di sisi utara Selat Hormuz memberikan negara tersebut pengaruh strategis terhadap salah satu jalur utama ekspor minyak dunia. Selat ini menjadi titik vital bagi keamanan energi global dan kepentingan nasional Arab Saudi, mengingat sebagian besar ekspor minyak Saudi bergantung pada stabilitas jalur tersebut. Dalam kerangka Coplin, kondisi geografis ini membentuk persepsi elite politik Iran dan Arab Saudi terhadap risiko eskalasi konflik, karena gangguan keamanan maritim dapat memicu tekanan internasional yang lebih luas serta

merugikan kepentingan ekonomi domestik masing-masing negara (EIA 2023).

Selat Hormuz, keterlibatan Iran dan Arab Saudi dalam konflik regional di sekitar Bab el-Mandeb juga memperkuat dimensi geografis dalam hubungan bilateral keduanya. Dukungan Iran terhadap kelompok Houthi di Yaman dan keterlibatan Arab Saudi dalam koalisi militer di kawasan tersebut menciptakan risiko keamanan yang meluas hingga jalur perdagangan energi menuju Laut Merah dan Eropa. Bagi elite pengambil keputusan Iran, eskalasi konflik di wilayah ini meningkatkan kemungkinan keterlibatan aktor eksternal dan mempersempit ruang diplomasi internasional, sehingga memperbesar biaya kebijakan luar negeri yang bersifat konfrontatif.

Dalam perspektif Coplin, kondisi geografis yang sarat risiko ini berfungsi sebagai faktor pembatas dalam proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Ketergantungan kawasan Teluk Persia terhadap stabilitas maritim mendorong Iran dan Arab Saudi untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari konflik terbuka. Ketegangan yang berkelanjutan tidak hanya menguras sumber daya, tetapi juga meningkatkan kerentanan ekonomi dan politik domestik akibat potensi gangguan jalur energi dan tekanan internasional.

Pemulihan hubungan diplomatik Iran–Arab Saudi pada tahun 2023 dapat dipahami sebagai respons terhadap realitas geografis tersebut. Elite politik Iran dan Arab Saudi tampaknya menyadari bahwa stabilitas kawasan Teluk Persia merupakan kepentingan strategis bersama yang tidak dapat dicapai melalui konfrontasi berkelanjutan. Dengan membuka kembali jalur diplomasi dan komunikasi bilateral, kedua negara berupaya mengelola risiko geografis secara lebih konstruktif dan mengurangi kemungkinan eskalasi konflik yang dapat merugikan kepentingan nasional masing-masing.

Dengan demikian, melalui kerangka teori William D. Coplin, faktor geografis tidak diposisikan sebagai sumber ancaman objektif, melainkan sebagai konteks struktural yang memengaruhi persepsi elite pengambil keputusan. Kedekatan geografis dan kepentingan bersama di jalur energi strategis mendorong Iran untuk menyesuaikan kebijakan luar negerinya menuju pendekatan yang lebih

pragmatis, yang tercermin dalam keputusan untuk menormalisasi hubungan diplomatik dengan Arab Saudi pada tahun 2023.

3.5 Kekuatan Budaya

Dalam teori proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri William D. Coplin, budaya politik dan tradisi diplomasi suatu negara merupakan faktor penting yang membentuk preferensi, gaya, dan kecenderungan kebijakan luar negeri elite pengambil keputusan. Budaya politik tidak berfungsi sebagai sumber ancaman objektif, melainkan sebagai kerangka nilai dan norma yang memengaruhi bagaimana suatu negara merespons konflik, tekanan eksternal, dan peluang diplomasi. Dengan demikian, kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh tradisi historis, ideologi, serta pola perilaku diplomatik yang berkembang dalam sistem politik domestik (Coplin 1992).

Iran budaya politik luar negeri pasca-Revolusi Islam 1979 dibentuk oleh ideologi revolusioner yang menekankan perlawanan terhadap dominasi Barat dan penegasan identitas Islam Syiah. Tradisi ini mendorong kebijakan luar negeri Iran yang cenderung bersifat konfrontatif pada fase awal revolusi, khususnya terhadap negara-negara yang dipandang dekat dengan Amerika Serikat, termasuk Arab Saudi. Namun, seiring waktu, praktik diplomasi Iran juga menunjukkan kemampuan adaptasi dan pragmatisme ketika elite politik menilai bahwa pendekatan ideologis yang kaku tidak lagi sejalan dengan kepentingan nasional dan stabilitas domestik (Keynoush 2016).

Budaya kebijakan luar negeri Arab Saudi berakar pada tradisi monarki konservatif yang menekankan stabilitas regional, legitimasi keagamaan sebagai penjaga dua kota suci, serta diplomasi yang berhati-hati dan berbasis aliansi. Dalam praktiknya, Saudi cenderung menghindari konfrontasi langsung dan lebih memilih pendekatan diplomasi tertutup, mediasi, serta kerja sama multilateral untuk menjaga kepentingan strategisnya. Tradisi diplomasi ini tercermin dalam berbagai inisiatif regional Saudi yang berfokus pada stabilitas dan pengelolaan konflik tanpa eskalasi terbuka (Gause 2014).

Perbedaan budaya politik dan tradisi diplomasi antara Iran dan Arab Saudi selama bertahun-tahun memperkuat ketegangan hubungan bilateral. Iran sering memandang pendekatan Saudi yang dekat dengan Barat sebagai hambatan terhadap agenda ideologis dan regionalnya, sementara Saudi menilai retorika revolusioner Iran sebagai faktor yang mengganggu stabilitas kawasan. Dalam kerangka Coplin, perbedaan budaya kebijakan luar negeri ini membentuk persepsi elite pengambil keputusan dan memengaruhi pilihan kebijakan luar negeri masing-masing negara, khususnya dalam merespons konflik regional dan tekanan internasional.

Menjelang rekonsiliasi diplomatik pada tahun 2023, terjadi penyesuaian signifikan dalam praktik diplomasi kedua negara. Iran mulai menampilkan pendekatan kebijakan luar negeri yang lebih moderat dan pragmatis, sejalan dengan kebutuhan domestik untuk meredakan tekanan ekonomi dan membuka ruang diplomasi internasional. Di sisi lain, Arab Saudi juga menunjukkan fleksibilitas diplomatik dengan mengedepankan dialog dan normalisasi hubungan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas kawasan dan mendukung agenda transformasi nasionalnya. Perubahan gaya diplomasi ini menunjukkan bahwa budaya kebijakan luar negeri tidak bersifat statis, melainkan dapat beradaptasi mengikuti kalkulasi kepentingan nasional.

Dengan demikian, melalui perspektif teori William D. Coplin, kekuatan budaya dalam hubungan Iran–Arab Saudi dapat dipahami sebagai faktor yang membentuk gaya dan preferensi kebijakan luar negeri elite politik. Tradisi diplomasi dan budaya kebijakan yang sebelumnya memperkuat rivalitas mengalami penyesuaian seiring perubahan lingkungan strategis. Rekonsiliasi tahun 2023 mencerminkan pergeseran budaya kebijakan luar negeri kedua negara menuju pendekatan yang lebih pragmatis dan berorientasi pada stabilitas, yang menjadi bagian penting proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Iran.

3.6 Rekonsiliasi Iran-Saudi

Rekonsiliasi antara Iran dan Arab Saudi yang dimediasi oleh Tiongkok pada

tahun 2023 membawa dampak signifikan terhadap dinamika geopolitik Timur Tengah. Kesepakatan ini mengakhiri ketegangan diplomatik yang telah berlangsung sejak 2016 dan membuka ruang kerja sama baru di bidang keamanan, energi, dan ekonomi. Normalisasi hubungan tersebut mencerminkan perubahan kalkulasi kebijakan luar negeri kedua negara dalam merespons tekanan domestik dan internasional, sekaligus menandai pergeseran peran aktor eksternal dalam pengelolaan konflik kawasan.

Cina sangat berkepentingan menjadi mediator dalam pemulihan hubungan Arab Saudi dan Iran karena konflik berkepanjangan di Timur Tengah secara langsung berdampak pada kepentingan strategisnya, terutama di bidang energi dan ekonomi. Cina merupakan importir minyak terbesar di dunia dan sangat bergantung pada pasokan energi dari kawasan Timur Tengah, termasuk dari Arab Saudi dan Iran. Ketegangan atau eskalasi konflik antara kedua negara tersebut berpotensi mengganggu stabilitas pasokan energi dan mengancam proyek-proyek ekonomi Cina, khususnya yang berada dalam kerangka Belt and Road Initiative. Oleh karena itu, mendorong stabilitas regional menjadi kebutuhan pragmatis bagi Beijing untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhannya. Selain faktor ekonomi, Cina juga memiliki posisi diplomatik yang relatif netral dan seimbang dalam hubungannya dengan Arab Saudi maupun Iran. Tidak seperti Amerika Serikat yang kerap dipersepsikan berpihak, Cina berhasil membangun hubungan strategis dengan kedua negara tanpa terlibat langsung dalam rivalitas ideologis dan konflik kawasan.

Kondisi ini memberikan legitimasi dan kepercayaan bagi Cina untuk berperan sebagai mediator yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Peran tersebut sekaligus memperkuat citra Cina sebagai aktor internasional yang mengedepankan dialog dan penyelesaian konflik secara damai. Di tingkat global, keberhasilan Cina memediasi pemulihan hubungan Arab Saudi–Iran juga mencerminkan ambisi Beijing untuk meningkatkan peran dan pengaruhnya dalam tata kelola internasional. Mediasi ini menjadi simbol pergeseran dinamika kekuatan global menuju tatanan dunia yang lebih multipolar, di mana Cina

berupaya menawarkan alternatif kepemimpinan diplomatik selain Barat. Dengan demikian, keinginan Cina menjadi mediator tidak hanya didorong oleh kepentingan kawasan, tetapi juga oleh strategi jangka panjang untuk memperkuat posisinya sebagai kekuatan besar yang berpengaruh dalam politik global.

Salah satu dampak utama dari rekonsiliasi ini adalah meningkatnya peluang stabilitas regional. Sebelum tahun 2023, rivalitas Iran dan Arab Saudi tercermin dalam berbagai konflik proksi di Yaman, Suriah, dan Lebanon, yang memperburuk krisis kemanusiaan dan menghambat pembangunan kawasan. Normalisasi hubungan menciptakan ruang bagi pendekatan diplomatik yang lebih konstruktif. Dalam konteks Yaman, rekonsiliasi membuka peluang bagi Iran dan Arab Saudi untuk menahan dukungan militer terhadap aktor-aktor lokal dan mendorong proses dialog politik, sehingga mengurangi eskalasi konflik yang selama ini membebani kepentingan nasional kedua negara (Duan dan Aldamer 2022).

Stabilitas juga berpotensi meningkat di Suriah dan Lebanon, di mana persaingan pengaruh Iran dan Arab Saudi selama ini memperdalam fragmentasi politik. Dengan menurunnya ketegangan bilateral, kedua negara memiliki insentif untuk mengurangi keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam konflik internal negara-negara tersebut. Dari perspektif teori Coplin, perubahan ini menunjukkan bagaimana faktor internasional dan persepsi elite terhadap biaya konflik mendorong penyesuaian kebijakan luar negeri menuju pendekatan yang lebih pragmatis.

Selain dampak regional, rekonsiliasi Iran–Arab Saudi memiliki implikasi global yang signifikan, terutama terkait meningkatnya peran Tiongkok sebagai mediator. Keberhasilan Tiongkok dalam memfasilitasi dialog antara dua rival utama di Timur Tengah tidak terlepas dari kepentingan strategisnya. Dalam kerangka Coplin, keputusan Tiongkok untuk bertindak sebagai mediator dapat dipahami sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri yang mempertimbangkan faktor ekonomi, keamanan energi, dan posisi internasionalnya.

Tiongkok memiliki kepentingan langsung terhadap stabilitas Timur Tengah karena kawasan ini merupakan sumber utama impor energi bagi perekonomian Tiongkok. Iran dan Arab Saudi termasuk mitra energi utama Beijing, sehingga konflik berkepanjangan di antara keduanya berpotensi mengganggu keamanan pasokan energi dan stabilitas ekonomi domestik Tiongkok. Dengan memediasi rekonsiliasi, Tiongkok berupaya menciptakan lingkungan eksternal yang lebih stabil untuk mendukung kepentingan ekonominya (Garlick dan Havlová 2020).

Selain faktor ekonomi, Tiongkok juga melihat mediasi ini sebagai peluang untuk meningkatkan posisi dan legitimasi internasionalnya sebagai kekuatan global. Berbeda dengan Amerika Serikat, Tiongkok memosisikan diri sebagai aktor yang tidak mencampuri urusan domestik negara lain dan menekankan pendekatan diplomasi berbasis kepentingan ekonomi. Pendekatan ini diterima oleh Iran dan Arab Saudi karena dianggap lebih netral dan tidak membawa agenda politik atau keamanan tertentu. Dalam perspektif Coplin, persepsi positif kedua negara terhadap Tiongkok sebagai mediator berperan penting dalam keberhasilan proses rekonsiliasi.

Bagi Arab Saudi, rekonsiliasi yang dimediasi Tiongkok mencerminkan diversifikasi kebijakan luar negeri dan pengurangan ketergantungan eksklusif pada Amerika Serikat. Hubungan yang lebih erat dengan Tiongkok memberikan Saudi alternatif mitra strategis dalam bidang ekonomi dan diplomasi, sejalan dengan agenda Vision 2030 yang membutuhkan stabilitas regional dan investasi asing. Bagi Iran, keterlibatan Tiongkok membuka peluang untuk memperluas kerja sama ekonomi dan diplomatik di tengah keterbatasan hubungan dengan negara-negara Barat akibat sanksi internasional.

Rekonsiliasi ini juga berdampak pada dinamika pasar energi global. Sebagai dua produsen minyak utama, koordinasi yang lebih baik antara Iran dan Arab Saudi berpotensi mendukung stabilitas harga minyak dunia. Stabilitas ini menguntungkan kepentingan ekonomi kedua negara sekaligus mendukung kepentingan Tiongkok sebagai konsumen energi terbesar di dunia. Dengan demikian, kepentingan ekonomi ketiga aktor tersebut saling bertemu dalam proses

rekonsiliasi ini.

Di sisi lain, keberhasilan Tiongkok sebagai mediator menunjukkan berkurangnya dominasi Amerika Serikat dalam pengelolaan konflik Timur Tengah. Meskipun Amerika Serikat tetap memiliki pengaruh signifikan di bidang keamanan, normalisasi Iran–Arab Saudi memperlihatkan bahwa negara-negara kawasan semakin terbuka terhadap alternatif kepemimpinan global. Hal ini menegaskan pergeseran menuju tatanan internasional yang lebih multipolar.

Dengan demikian, melalui perspektif teori William D. Coplin, rekonsiliasi Iran–Arab Saudi dan peran Tiongkok sebagai mediator dapat dipahami sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri yang dipengaruhi oleh faktor domestik, kepentingan ekonomi, dan perubahan lingkungan internasional. Rekonsiliasi ini tidak hanya berdampak pada stabilitas regional, tetapi juga mencerminkan perubahan keseimbangan kekuatan global serta strategi adaptif negara-negara dalam menghadapi dinamika geopolitik kontemporer.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Hasil Kajian

Hasil kajian menunjukkan bahwa pemulihan hubungan diplomatik antara Iran dan Arab Saudi pada tahun 2023 merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri yang dipengaruhi oleh kombinasi faktor domestik, faktor internasional, serta persepsi elite pengambil keputusan, sebagaimana dijelaskan dalam teori *foreign policy decision making process* oleh William D. Coplin. Keputusan untuk berdamai tidak lahir dari satu faktor tunggal, melainkan dari akumulasi tekanan dan kepentingan yang mendorong kedua negara untuk meninjau ulang pola konfrontasi yang selama ini ditempuh. Bagi Iran, faktor domestik memainkan peran penting dalam mendorong perubahan kebijakan luar negeri. Tekanan ekonomi akibat sanksi internasional, keterbatasan akses pasar global, serta kebutuhan menjaga stabilitas politik internal mendorong elite Iran untuk mengurangi eskalasi konflik eksternal. Konflik berkepanjangan dengan Arab Saudi dinilai mempersempit ruang manuver diplomatik dan memperbesar beban ekonomi domestik. Oleh karena itu, normalisasi hubungan dipahami sebagai instrumen kebijakan luar negeri untuk mereduksi tekanan domestik dan membuka peluang diplomasi regional yang lebih luas.

Dari sisi faktor internasional, dinamika keamanan kawasan Timur Tengah yang semakin kompleks turut memengaruhi keputusan kedua negara. Konflik proksi di Yaman, Suriah, dan Lebanon menciptakan ketidakstabilan berkepanjangan yang merugikan kepentingan strategis Iran dan Arab Saudi. Selain itu, meningkatnya ketidakpastian komitmen keamanan Amerika Serikat di kawasan serta munculnya Tiongkok sebagai aktor global alternatif mendorong kedua negara untuk mengadopsi kebijakan luar negeri yang lebih adaptif dan pragmatis. Dalam konteks ini, rekonsiliasi dipandang sebagai langkah untuk menurunkan risiko konflik terbuka dan menyesuaikan posisi kedua negara terhadap perubahan tatanan internasional. Persepsi elite pengambil keputusan juga menjadi faktor kunci dalam proses rekonsiliasi. Elite politik Iran dan Arab Saudi

mulai memandang rivalitas berkepanjangan sebagai beban strategis yang tidak lagi sejalan dengan kepentingan nasional jangka panjang. Persepsi terhadap biaya konflik yang tinggi, baik secara ekonomi, politik, maupun keamanan, mendorong perubahan orientasi kebijakan luar negeri menuju pendekatan dialog dan normalisasi. Mediasi Tiongkok diterima karena dipersepsikan sebagai aktor yang relatif netral, tidak membawa agenda ideologis, serta memiliki kepentingan ekonomi yang sejalan dengan stabilitas kawasan.

Dengan demikian, hasil kajian ini menunjukkan bahwa keputusan Iran dan Arab Saudi untuk berdamai bukan semata-mata hasil penurunan ancaman militer, melainkan produk dari proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri yang mempertimbangkan kepentingan domestik, tekanan internasional, dan perubahan persepsi elite politik terhadap lingkungan strategis yang dihadapi.

4.2 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa pemulihan hubungan diplomatik antara Iran dan Arab Saudi pada tahun 2023 merupakan langkah strategis yang lahir dari proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri yang rasional dan pragmatis. Melalui perspektif teori William D. Coplin, keputusan ini dipahami sebagai respons terhadap tekanan ekonomi domestik, dinamika keamanan regional, serta perubahan konfigurasi kekuatan global yang menuntut penyesuaian kebijakan luar negeri kedua negara. Iran dan Arab Saudi menyadari bahwa konfrontasi berkepanjangan tidak lagi memberikan keuntungan strategis, melainkan justru memperbesar risiko instabilitas dan menghambat pencapaian kepentingan nasional masing-masing. Normalisasi hubungan dipilih sebagai instrumen kebijakan luar negeri untuk mengelola konflik secara lebih terkendali, menciptakan stabilitas kawasan, serta memperluas ruang diplomasi dan kerja sama ekonomi. Rekonsiliasi ini juga menandai pergeseran pendekatan kebijakan luar negeri kedua negara dari pola konfrontatif menuju pendekatan yang lebih pragmatis dan adaptif. Peran Tiongkok sebagai mediator memperlihatkan terbukanya ruang multipolaritas dalam sistem internasional, di mana negara-

negara kawasan tidak lagi bergantung pada satu aktor global dalam penyelesaian konflik. Dengan demikian, rekonsiliasi Iran–Arab Saudi tidak hanya berdampak pada hubungan bilateral kedua negara, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas regional dan mencerminkan perubahan penting dalam dinamika politik internasional kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Ackerman, H. 2011. "Symptoms of Cold Warfare between Saudi Arabia and Iran: Part 1 of 3." *Northeastern University Political Review*.
<https://nupoliticalreview.org/2011/11/28/symptoms-of-cold-warfare-between-saudi-arabia-and-iran-part-1-of-3/>.
- Ansari, Daniel. 2017. "OPEC, Saudi Arabia, and the Shale Revolution: Insights from Equilibrium Modelling and Oil Politics." *Energy Policy* 111: 166–178. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.09.010>.
- Keynoush, Banafsheh. 2016. *Saudi Arabia and Iran: Friends or Foes?* New York: Springer.
- Badeeb, Saeed M. 1993. *Saudi-Iranian Relations 1932–1982*. Durham: Centre for Arab and Iranian Studies.
- Duan, Xue, and Saad Aldamer. 2022. "The Saudi Arabia–China Relationship at a Crossroad: A Neoclassical Realist Analysis." *Asian Politics & Policy* 14 (1): 114–128. <https://doi.org/10.1111/aspp.12619>.
- European Council on Foreign Relations (ECFR). 2024. *Mending Fences: Europe's Stake in the Saudi-Iran Detente*.
- Garlick, Jeremy, and Radka Havlová. 2020. "China's 'Belt and Road' Economic Diplomacy in the Persian Gulf: Strategic Hedging amidst Saudi–Iranian Regional Rivalry." *Journal of Current Chinese Affairs* 49 (1): 82–105. <https://doi.org/10.1177/1868102619898706>.
- Gause, F. Gregory III. 2009. *The International Relations of the Persian Gulf*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gustafson, A. J. 2020. "Strategy in the Gulf: It's No Longer 1979." *Proceedings*, June 8. <https://www.usni.org/magazines/proceedings/2020/june/strategy-gulf-its-no-longer-1979>.
- Hussein, Abdullah A. 2012. *So History Doesn't Forget: Alliances Behavior in Foreign Policy of the Kingdom of Saudi Arabia, 1979–1990*. Bloomington, IN: AuthorHouse.
- Jalal, Syed U., Yasir Khan, and Ghulam M. Pitafi. 2023. "Saudi–Iran Relationship: The Beginning of a New Era." *Qlantic Journal of Social Sciences and Humanities* 4 (3): 1–12.

Wikipedia. 2025. "List of Equipment of the Iranian Army." *Wikipedia, The Free Encyclopedia*.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_equipment_of_the_Iranian_army.

Mokhtari, Farhad. 2005. "No One Will Scratch My Back: Iranian Security Perceptions in Historical Context." *Middle East Journal* 59 (2).

Buku

Altoraifi, Adel. 2012. *Understanding the Role of State Identity in Foreign Policy Decision-Making: The Rise and Demise of Saudi-Iranian Rapprochement (1997–2009)*. PhD diss., London School of Economics.

Alvandi, Roham. 2012. "Nixon, Kissinger, and the Shah: The Origins of Iranian Primacy in the Persian Gulf." *Diplomatic History* 36 (2): 337–372.
<https://doi.org/10.1111/j.1467-7709.2011.01025.x>.

Bakry, Umar Suryadi. 2017. *Dasar-Dasar Hubungan Internasional*. Depok: Kencana.

Center for Strategic and International Studies (CSIS). 2023. *Iranian Missile Capabilities and Strategy Report 2023*. Washington, DC: CSIS.

Coplin, William D. 1992. *Introduction to International Politics*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Cordesman, Anthony H., and Arleigh Burke. 2001. *Saudi Arabia Enters the 21st Century: The Military and International Security Dimensions*. Washington, DC: Center for Strategic and International Studies.

Creswell, John W., and J. David Creswell. 2017. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Ehteshami, Anoushiravan, and Raymond Hinnebusch. 2023. *Dynamics of Change in the Persian Gulf: Political Economy, War and Revolution*. London: Routledge.

Forbes, Ian, and Mark Hoffman. 2016. *Political Theory, International Relations, and the Ethics of Intervention*. Cham: Springer.

Houghton, Ben. 2022. "China's Balancing Strategy between Saudi Arabia and Iran: The View from Riyadh." *Asian Affairs* 53 (1): 124–144.
<https://doi.org/10.1080/03068374.2022.2029065>.

- Hudson, Valerie M. 2005. "Foreign Policy Analysis: Actor-Specific Theory and the Ground of International Relations." *Foreign Policy Analysis* 1 (1): 1–30.
- International Atomic Energy Agency (IAEA). 2023. *Iran Nuclear Report*. Vienna: IAEA.
- International Institute for Strategic Studies (IISS). 2024. *The Military Balance 2024*. London: Routledge.
- International Monetary Fund (IMF). 2024. *World Economic Outlook Database: April 2024 Edition*. Washington, DC: International Monetary Fund.
- Jane's Defence Weekly. 2024. *Middle East Military Modernization Review 2024*. London: Jane's Information Group.
- Kristanto, Andri. 2020. *Manajemen Konflik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Litvak, Meir. 2017. "Iran and Saudi Arabia: Religious and Strategic Rivalry." *Begin-Sadat Center for Strategic Studies* 128: 49–54.
- Mabon, Simon. 2015. *Saudi Arabia and Iran: Soft Power Rivalry in the Middle East*. London: I.B. Tauris.
- Mabon, Simon. 2023. *The Struggle for Supremacy in the Middle East: Saudi Arabia and Iran*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Machmudi, Yon. 2020. *Timur Tengah dalam Sorotan: Dinamika Timur Tengah dalam Perspektif Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Machmudi, Yon. 2021. *Timur Tengah dalam Sorotan: Dinamika Timur Tengah dalam Perspektif Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Matthiesen, Toby. 2013. *Sectarian Gulf: Bahrain, Saudi Arabia, and the Arab Spring That Wasn't*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Middle East Institute (MEI). 2023. *Saudi Military Modernization and Regional Strategy Report*. Washington, DC: MEI.
- Morgenthau, Hans J. 1948. *Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace*. New York: Alfred A. Knopf.
- Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). 2024. *Annual Statistical Bulletin 2024*. Vienna: OPEC Secretariat.

RAND Corporation. 2022. *Understanding Iran's Military Strategy*. Santa Monica, CA: RAND.

Rosyidin, Mohammad. 2023. *Teori Hubungan Internasional: Dari Perspektif Klasik sampai Non-Barat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sari, Irem. 2023. "The Impact of the Iran–Saudi Arabia Deal on the Middle East: A New Wave of Regional Normalization?" *ORSAM Analysis* 312: 1–24.

Shine, Shira, Yoel Guzansky, and Eran Shavit. 2023. *Iran and Saudi Arabia Renew Relations*. INSS Insight no. 1695.

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). 2024. *Military Expenditure Database 2024*. Stockholm: SIPRI.

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). 2024. *Military Expenditure Database 2024*. Stockholm: SIPRI.

Terrill, W. Andrew. 2011. *The Saudi-Iranian Rivalry and the Future of Middle East Security*. Carlisle, PA: Strategic Studies Institute.

United Nations (UN). 2024. *World Population Prospects 2024*. New York: United Nations.

United States Department of Defense. 2023. *Middle East Defense Cooperation Report 2023*. Washington, DC: Department of Defense.

Wehrey, Frederic, Theodore Karasik, Alireza Nader, Jeremy J. Ghez, Lydia Hansell, and Robert Guffey. 2017. *Saudi-Iranian Relations Since the Fall of Saddam: Rivalry, Cooperation, and Implications for U.S. Policy*. Santa Monica, CA: RAND Corporation.

World Bank. 2024. *World Development Indicators 2024*. Washington, DC: World Bank Group.

Artikel Daring

BBC. 1977. "1976: OPEC Members Split over Prices." *BBC News*, December 17. http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/december/17/newsid_2546000/2546675.stm.

Benmansour, Mohammed. 2023. "Iran's Embassy Reopens in Saudi Arabia for First Time in Seven Years." *Reuters*, June 6. <https://www.reuters.com/world/middle-east/irans-embassy-reopens-saudi-capital-riyadh-al-arabiya-tv-2023-06-06/>.

Berg, Becky R. 2023. "Iran and Saudi Arabia to Renew Ties after Seven-Year Rift." *BBC News*, March 10. <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-64906996>.

Global Firepower. 2025. *2025 Military Strength Ranking*. Global Firepower Index. <https://www.globalfirepower.com>.

Karabell, Zachary. 2019. "Twin Pillars Policy." *Encyclopedia.com*. <https://www.encyclopedia.com>.

Naar, Ismaeel. 2023. "Saudi Arabia Says Deal with Iran Does Not Mean Consensus on All Issues but Dialogue Is Key." *The National*, March 13. <https://www.thenationalnews.com>.

The Iran Primer. 2023. "Iran and Saudi Arabia Restore Ties." *The Iran Primer*, March 10. <https://iranprimer.usip.org>.